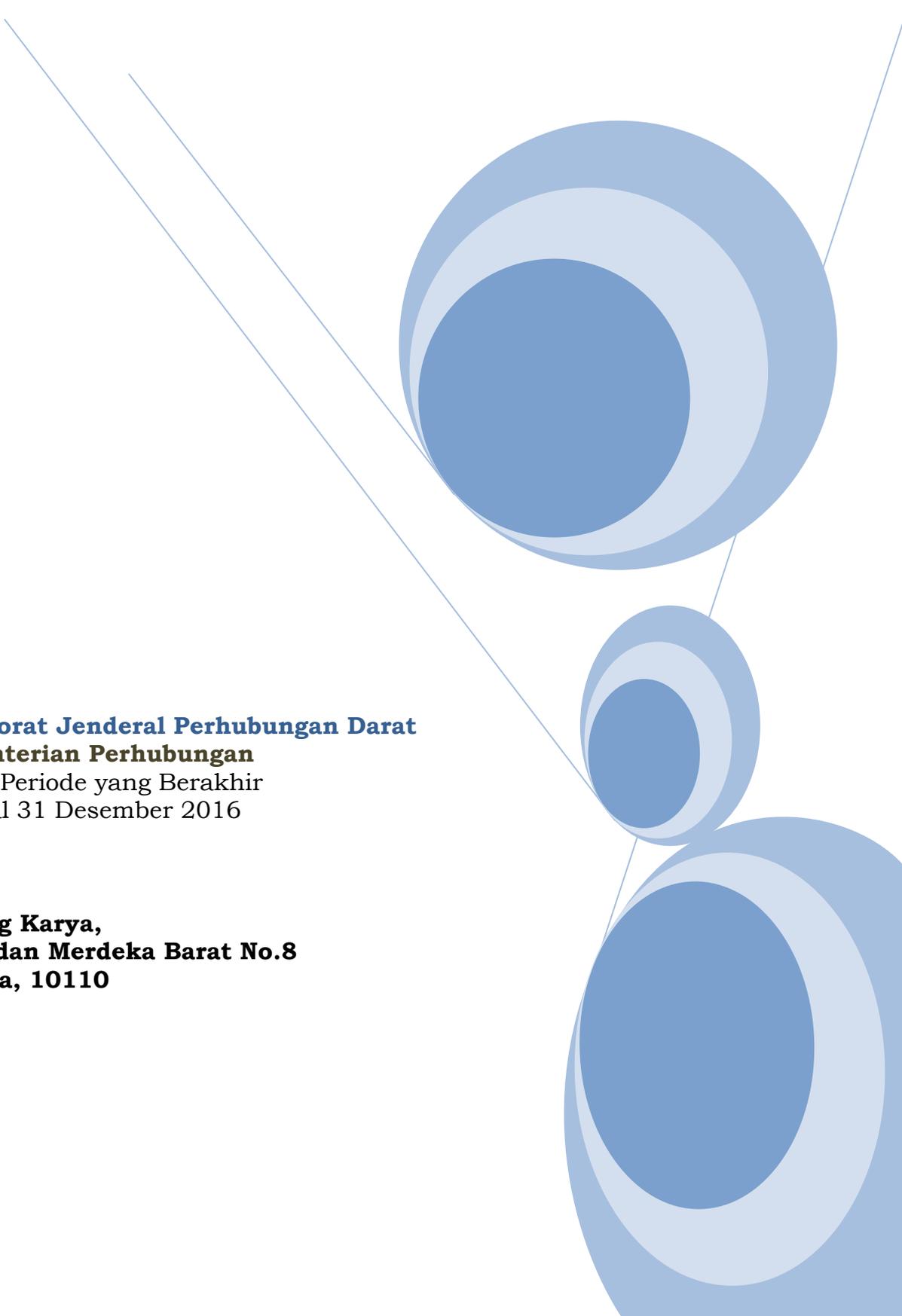


Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember
2016

Gedung Karya,

**Jalan Medan Merdeka Barat No. 8
Jakarta, 10110**



Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
Kementerian Perhubungan
Untuk Periode yang Berakhir
Tanggal 31 Desember 2016

Gedung Karya,
Jl. Medan Merdeka Barat No.8
Jakarta, 10110

KATA PENGANTAR

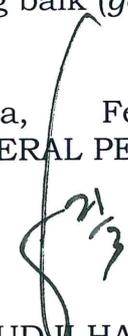
Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Perhubungan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/ pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, Februari 2017
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT


Drs. PUDJI HARTANTO, MM
NIP 19590824 201603 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	4
II. Neraca	5
III. Laporan Operasional	6
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	7
V. Catatan atas Laporan Keuangan	8
A. Penjelasan Umum	8
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	23
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	33
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	88
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	96
F. Pengungkapan Penting Lainnya	101
VI. Lampiran dan Daftar	112

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Tahunan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, Februari 2017

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT


Drs. PUDJI HARTANTO, MM
NIP 19590824 201603 1 001

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2016 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2016.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2016 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp159.270.818.913,- atau mencapai 379 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp42.009.502.500,-.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2016 adalah sebesar Rp2.836.894.157.566,- atau mencapai 98,03 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp3.518.426.925.000,-.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2016. Nilai Aset per 31 Desember 2016 dicatat dan disajikan sebesar Rp15.650.054.638.719,- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp3.410.947.549.110,-; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,-; Aset Tetap (neto) sebesar Rp8.635.825.133.519,-; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp3.603.281.956.090,-.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp3.156.834.725,- dan Rp15.646.897.803.994,-.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp148.534.059.926,-, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp1.342.426.091.828,- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp1.193.892.031.902,-. Defisit Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp1.536.330.154.953,- dan Rp 0,- sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp1.536.330.154.953,-.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2016 adalah sebesar Rp15.329.083.953.901,- ditambah Defisit-LO sebesar Rp1.536.330.154.953,- kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp1.611.992.580.089,- dan transaksi antarentitas senilai Rp242.151.424.957,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2016 adalah senilai Rp15.646.897.803.994,-.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 disusun dan disajikan

berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2016 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2016		% thd Angg	TA 2015
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	42.009.502.500	159.270.818.913	379,13	52.384.329.809
JUMLAH PENDAPATAN		42.009.502.500	159.270.818.913	379,13	52.384.329.809
BELANJA	B.2.				
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai	B.3	95.683.375.000	78.104.899.994	81,63	76.561.997.538
Belanja Barang	B.4	2.042.744.762.000	1.429.374.550.141	69,97	4.211.910.456.909
Belanja Modal	B.5	1.379.998.788.000	1.329.414.707.431	96,33	1.341.320.910.822
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	0,00	-
JUMLAH BELANJA		3.518.426.925.000	2.836.894.157.566	80,63	5.629.793.365.269

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

NERACA

PER 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2016	2015
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	3.281.206	34.956.823
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	41.182.255	37.905.850
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	13.424.945	-
Piutang PNBP	C.4	-	1.931.156.488
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	11.916.667
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.9	-	-
Persediaan	C.10	3.410.889.660.704	4.035.484.582.009
Jumlah Aset Lancar		3.410.947.549.110	4.037.500.517.837
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.14	493.424.519.575	488.074.753.575
Peralatan dan Mesin	C.15	5.388.113.204.230	4.355.718.749.321
Gedung dan Bangunan	C.16	1.079.846.864.178	968.209.908.380
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.17	2.837.607.055.840	2.802.706.011.782
Aset Tetap Lainnya	C.18	355.965.443.689	347.949.295.129
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.19	626.682.678.920	384.747.414.505
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	(2.145.814.632.913)	(1.667.846.123.702)
Jumlah Aset Tetap		8.635.825.133.519	7.679.560.008.990
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.21	714.639.045.561	477.782.227.441
Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan	C.22	559.920.000	-
Aset Lain-Lain	C.23	3.414.609.760.870	3.196.586.476.490
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.24	(526.526.770.341)	(55.219.356.229)
Jumlah Aset Lainnya		3.603.281.956.090	3.619.149.347.702
JUMLAH ASET		15.650.054.638.719	15.336.209.874.529
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.25	3.281.206	34.956.823
Utang kepada Pihak Ketiga	C.26	3.153.553.519	7.090.963.805
Pendapatan Diterima di Muka	C.27	-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.28	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		3.156.834.725	7.125.920.628
JUMLAH KEWAJIBAN		3.156.834.725	7.125.920.628
EKUITAS			
Ekuitas	C.29	15.646.897.803.994	15.329.083.953.901
JUMLAH EKUITAS		15.646.897.803.994	15.329.083.953.901
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		15.650.054.638.719	15.336.209.874.529

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2016	2015
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	148.534.059.926	40.334.351.049
JUMLAH PENDAPATAN		148.534.059.926	40.334.351.049
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	77.186.642.100	77.200.599.432
Beban Persediaan	D.3	4.407.007.442	3.778.714.865
Beban Barang dan Jasa	D.4	704.356.283.125	661.746.098.678
Beban Pemeliharaan	D.5	60.322.151.630	39.071.890.685
Beban Perjalanan Dinas	D.6	102.642.889.041	68.764.054.700
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	393.511.118.490	674.470.146.860
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN		1.342.426.091.828	1.525.031.505.220
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(1.193.892.031.902)	(1.484.697.154.171)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan Pelepasan Aset Nonlancar	D.11	65.400.000	-
Beban Penjualan Aset Non Lancar		(34.168.189.380)	(61.274.004.940)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		259.164.862.050	76.451.259.878
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		(567.500.195.721)	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(342.438.123.051)	15.177.254.938
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(1.536.330.154.953)	(1.469.519.899.233)
POS LUAR BIASA			
Pendapatan PNB	D.12	-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(1.536.330.154.953)	(1.469.519.899.233)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2016	2015
EKUITAS AWAL	E.1	15.329.083.953.901	12.355.278.619.729
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(1.536.330.154.953)	(1.469.519.899.233)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3		
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	(3.998.328.986.967)
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	3.497.133.000	(296.006.376.886)
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	1.943.201.660.619	3.607.459.564.738
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	(334.706.213.530)	1.970.999.828.756
JUMLAH		1.611.992.580.089	1.284.124.029.641
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	242.151.424.957	3.159.201.203.764
EKUITAS AKHIR	E.5	15.646.897.803.994	15.329.083.953.901

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

Dasar Hukum Direktorat Jenderal Perhubungan Darat didirikan sebagai salah satu entitas yang berada di bawah kementerian *Entitas dan* Perhubungan. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan *Rencana* Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan. Entitas berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat No.8, Jakarta Pusat.

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mempunyai tugas dan fungsi dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perhubungan darat.

Untuk mewujudkan tujuan di atas, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat berkomitmen dengan visi ***“Menjadi organisasi pemerintah yang profesional, yang dapat memfasilitasi dan mendukung mobilitas masyarakat, melalui suatu layanan transportasi darat yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan berkeadilan, yang aman, selamat, mudah dijangkau, berkualitas, berdaya-saing tinggi, dan terintegrasi dengan moda transportasi lainnya dan dapat dipertanggungjawabkan.”*** Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Menciptakan sistem pelayanan transportasi darat yang aman, selamat, dan mampu menjangkau masyarakat dan wilayah Indonesia;
- Menciptakan dan mengorganisasi transportasi jalan, sungai dan penyeberangan serta perkotaan yang berkualitas, berdaya saing dan berkelanjutan;
- Mendorong berkembangannya industri transportasi darat yang transparan dan akuntabel;
- Membangun prasarana dan sarana transportasi darat.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2016 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2016 ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang meliputi wilayah serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

Jumlah entitas akuntansi di lingkup Direktorat Jenderal Perhubungan Darat adalah 47 entitas. Rincian entitas tersebut tersaji sebagai berikut:

Rekapitulasi Jumlah Entitas UAPB-E1

NO	Kode Satker	Nama Satker	Jumlah Jenis Kewenangan		
			KP	KD	DK
1	412735	Sekretariat Jenderal Perhubungan Darat	√		
2	418881	Direktorat Angkutan dan Multimoda Perhubungan Darat	√		
3	439159	Direktorat Pembinaan Keselamatan Perhubungan Darat	√		

4	445510	Direktorat Lalu Lintas Perhubungan Darat	√		
5	466570	Direktorat Sarana Perhubungan Darat	√		
6	466941	Direktorat Prasarana Perhubungan Darat		√	
7	401692	Satker Perhubungan Darat Provinsi Aceh		√	
8	401693	Satker Perhubungan Darat Provinsi Sumatera Utara		√	
9	401694	Satker Perhubungan Darat Provinsi Sumatera Barat		√	
10	401697	Satker Perhubungan Darat Provinsi Riau		√	
11	401698	Satker Perhubungan Darat Provinsi Kepulauan Riau		√	
12	401699	Satker Perhubungan Darat Provinsi Bangka Belitung		√	
13	401701	Satker Perhubungan Darat Provinsi Bengkulu		√	
14	467701	Balai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan Jambi		√	
15	401700	Satker Perhubungan Darat Provinsi Sumatera Selatan		√	
16	401702	Satker Perhubungan Darat Provinsi Lampung		√	
17	606500	Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Merak		√	
18	401703	Satker Perhubungan Darat Provinsi Banten		√	
19	25734	Balai Pengujian Laik Jalan Dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor Bekasi	√		
20	401704	Satker Perhubungan Darat Provinsi Jawa Barat		√	
21	401705	Satker Perhubungan Darat Provinsi Jawa Tengah		√	
22	401706	Satker Perhubungan Darat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta		√	
23	401707	Satker Perhubungan Darat Provinsi Jawa Timur		√	

24	467702	Balai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan Denpasar		√	
25	606501	Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk		√	
26	401708	Satker Perhubungan Darat Provinsi Nusa Tenggara Barat		√	
27	606502	Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Lembar		√	
28	401711	Satker Perhubungan Darat Provinsi Nusa Tenggara Timur		√	
29	401712	Satker Perhubungan Darat Provinsi Kalimantan Barat		√	
30	467703	Balai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan Palangkaraya		√	
31	401713	Satker Perhubungan Darat Provinsi Kalimantan Selatan		√	
32	401714	Satker Perhubungan Darat Provinsi Kalimantan Timur		√	
33	606481	Unit Pelaksana Teknis Kariangau	√		
34	401717	Satker Perhubungan Darat Provinsi Kalimantan Utara		√	
35	401718	Satker Perhubungan Darat Provinsi Sulawesi Selatan		√	
36	401719	Satker Perhubungan Darat Provinsi Sulawesi Barat		√	
37	401720	Satker Perhubungan Darat Provinsi Sulawesi Utara		√	
38	467704	Balai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan Palu		√	
39	606503	Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Pagimana		√	
40	401723	Satker Perhubungan Darat Provinsi Gorontalo		√	
41	603920	Unit Pelaksana Teknis Gorontalo	√		
42	401724	Satker Perhubungan Darat Provinsi Sulawesi Tenggara		√	

43	401725	Satker Perhubungan Darat Provinsi Maluku		√	
44	401726	Satker Perhubungan Darat Provinsi Maluku Utara		√	
45	401727	Satker Perhubungan Darat Provinsi Papua		√	
46	401728	Satker Perhubungan Darat Provinsi Papua Barat		√	
47	604126	Unit Pelaksana Teknis Kalabahi	√		
Jumlah			9	38	0
Keterangan: KP = Kantor Pusat, KD = Kantor Daerah, DK = Dekonsentrasi					

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dalam penyusunan dan

penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2016 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan-LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan

bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO **(2) Pendapatan-LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan;
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa;
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat

Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

*Implementasi
Akuntansi
Pemerintah
Berbasis Akrual
Pertama Kali*

(8) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2015 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam laporan Operasional dan

laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015 adalah merupakan implementasi yang pertama.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	2016	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	1.400.000.000	1.400.000.000
Pendapatan Lain-lain	100.000.000	100.000.000
Jumlah Pendapatan	1.500.000.000	1.500.000.000
Belanja		
Belanja Pegawai	13.500.000.000	14.000.000.000
Belanja Barang	32.000.000.000	25.600.000.000
Belanja Bantuan Sosial	400.000.000	400.000.000
Belanja Modal	16.000.000.000	22.200.000.000
Jumlah Belanja	61.900.000.000	62.200.000.000

Realisasi

Pendapatan
Rp159.270.819.913,-
13,-

B.1 PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp159.270.819.913,- atau mencapai 379 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp42.009.502.500,-. Pendapatan lingkup Direktorat Jenderal Perhubungan Darat terdiri dari Pendapatan dari Pengelolaan BMN, Pendapatan Jasa, Pendapatan Iuran dan Denda, dan Pendapatan Lain-lain. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2016		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan dari Pengelolaan BMN	-	83.881.640	
Pendapatan Jasa	42.009.502.500	146.778.514.696	349,39
Pendapatan luran dan Denda	-	1.692.090.487	
Pendapatan Lain-lain	-	10.716.332.090	
Jumlah	42.009.502.500	159.270.818.913	379,13

Realisasi Pendapatan Jasa TA 2016 mengalami kenaikan sebesar 204,04 persen dibandingkan TA 2015. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya pendapatan dari pengelolaan BMN dan pendapatan jasa.

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2016 dan 2015

URAIAN	REALISASI T.A. 2016	REALISASI T.A. 2015	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Pengelolaan BMN	83.881.640	-	0,00
Pendapatan Jasa	146.778.514.696	23.750.789.668	517,99
Pendapatan luran dan Denda	1.692.090.487	11.965.543.678	(85,86)
Pendapatan Lain-lain	10.716.332.090	16.667.996.463	(35,71)
Jumlah	159.270.818.913	52.384.329.809	204,04

Realisasi

Belanja

Rp2.836.894.157.566,-

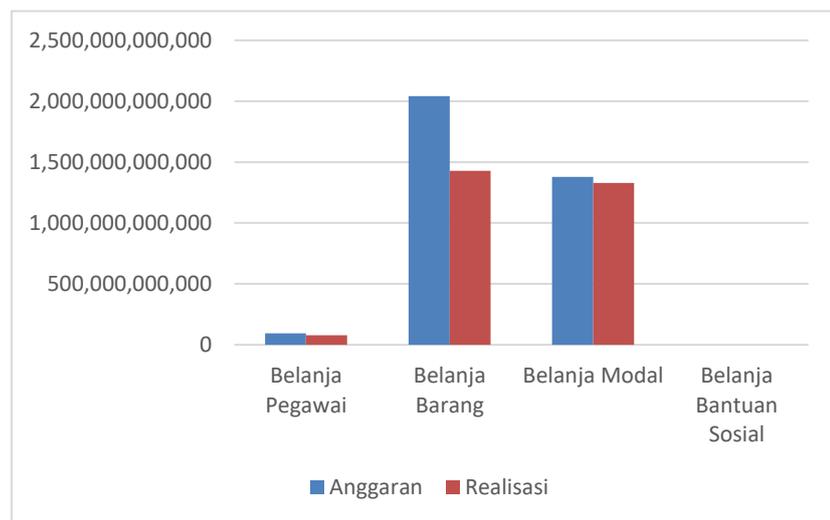
B.2. BELANJA

Realisasi Belanja pada TA 2016 adalah sebesar Rp2.836.894.157.566,- atau 80,63 persen dari anggaran belanja sebesar Rp3.518.426.925.000,-. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja TA 2016

URAIAN	2016		%
	ANGGARAN	REALISASI	
Belanja Pegawai	95.683.375.000	78.104.899.994	81,63
Belanja Barang	2.042.744.762.000	1.429.374.550.141	69,97
Belanja Modal	1.379.998.788.000	1.329.414.707.431	96,33
Belanja Bantuan Sosial	0	0	0
Total Belanja Kotor	3.518.426.925.000	2.836.894.157.566	80,63
Pengembalian Belanja	-	-	0
Total Belanja	3.518.426.925.000	2.836.894.157.566	80,63

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Dibandingkan dengan Tahun 2015, Realisasi Belanja TA 2016 mengalami penurunan sebesar 49,61 persen dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya.

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2016 dan 2015

URAIAN	REALISASI TA 2016	REALISASI TA 2015	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	78.104.899.994	76.561.997.538	2,02
Belanja Barang	1.429.374.550.141	4.211.910.456.909	(66,06)
Belanja Modal	1.329.414.707.431	1.341.320.910.822	(0,89)
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	2.836.894.157.566	5.629.793.365.269	(49,61)

Belanja

Pegawai

Rp78.104.899.994,-

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp78.104.899.994,- dan Rp76.561.997.538,-. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi belanja TA 2016 mengalami kenaikan sebesar 2,02 persen dari TA 2015. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya penambahan pegawai dalam rangka mendukung program maupun kegiatan dalam beberapa tahun mendatang.
2. Penambahan remunerasi PNS.

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2016 dan 2015

URAIAN	REALISASI TA 2016	REALISASI TA 2015	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	51.213.073.637	45.248.555.245	13,18
Belanja Tunj. Khusus & Transito	25.109.580.357	30.537.881.293	(17,78)
Belanja Lembur	1.782.246.000	775.561.000	129,80
Jumlah Belanja Kotor	78.104.899.994	76.561.997.538	2,02
Pengembalian Belanja Pegawai	-	-	-
Jumlah Belanja	78.104.899.994	76.561.997.538	2,02

Belanja Barang **B.4 Belanja Barang**

Rp1.429.374.550.141,-

Realisasi Belanja Barang TA 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp1.429.374.550.141,- dan Rp4.211.910.456.909,-.

Realisasi Belanja Barang TA 2016 mengalami penurunan 66,06 persen dari TA 2015. Hal ini antara lain disebabkan oleh menurunnya belanja barang oprasional dan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat sepanjang tahun 2016.

Perbandingan Belanja Barang TA 2016 dan 2015

URAIAN	REALISASI TA 2016	REALISASI TA 2015	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	423.026.733.338	474.233.840.957	(10,80)
Belanja Barang Non Operasional	240.278.014.732	167.633.440.684	43,34
Belanja Jasa	40.997.053.812	21.127.933.454	94,04
Belanja Pemeliharaan	60.443.418.393	40.018.200.889	51,04
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	100.771.171.597	67.203.697.616	49,95
Belanja Perjalanan Luar Negeri	1.863.714.904	1.051.724.066	77,21
Belanja Barang Persediaan	3.148.051.162	1.111.314.336	183,27
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masy.	558.846.392.203	3.439.530.304.907	(83,75)
Jumlah Belanja Kotor	1.429.374.550.141	4.211.910.456.909	(66,06)
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	1.429.374.550.141	4.211.910.456.909	(66,06)

Rincian belanja barang persediaan, sebagai berikut

Uraian	Jumlah
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	3.166.301.162
Total	3.166.301.162

Rincian belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat, sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
Belanja Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat	338.782.668.900
Belanja Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	203.060.924.503
Belanja Barang Fisik Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	17.002.798.800
Total	558.846.392.203

Belanja Modal
Rp1.329.414.707.431,-

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp1.329.414.707.431,- dan Rp1.341.320.910.822,-. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2016 mengalami penurunan sebesar 0,89 persen dibandingkan TA 2015 disebabkan oleh penurunan belanja pada belanja modal tanah dan belanja modal lainnya.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2016 dan 2015

URAIAN	REALISASI T.A. 2016	REALISASI T.A. 2015	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	5.399.178.000	21.522.503.500	(74,91)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	243.054.420.425	213.878.122.443	13,64
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	145.682.428.019	61.568.142.189	136,62
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	11.051.056.650	1.241.413.231	790,20
Belanja Modal Lainnya	924.227.624.337	1.043.110.729.459	(11,40)
Jumlah Belanja Kotor	1.329.414.707.431	1.341.320.910.822	(0,89)
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	1.329.414.707.431	1.341.320.910.822	(0,89)

Belanja Modal Tanah
Rp5.399.178.000,-

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2016 dan TA 2015 adalah masing-masing sebesar Rp5.399.178.000,- dan Rp21.522.503.500,-. Realisasi TA 2016 mengalami penurunan sebesar 74,91 persen dibandingkan TA 2015.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2016 dan 2015

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2016	REALISASI T.A 2015	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	4.817.084.000	16.713.153.500	(71,18)
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat	0	0	
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	582.094.000	4.809.305.000	(87,90)
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	5.399.178.000	21.522.458.500	(74,91)
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja	5.399.178.000	21.522.458.500	(74,91)

Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Rp243.054.420.425,-

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin TA 2016 adalah sebesar Rp243.054.420.425,-, mengalami kenaikan sebesar 13,64 persen bila dibandingkan dengan TA 2015 sebesar Rp213.878.122.443,-. Terdapat penambahan nilai peralatan dan mesin yang berasal dari satker Direktorat Lalu Lintas Perhubungan Darat (445510) dengan nama kegiatan Pemeliharaan Alat Penerangan Jalan di Jalur Pantura (termasuk supervisi).

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
TA 2016 dan 2015*

URAIAN	REALISASI T.A. 2016	REALISASI T.A. 2015	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	239.695.312.475	213.878.122.443	12,07
Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	3.359.107.950	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	243.054.420.425	213.878.122.443	13,64
Pengembalian	0	0	0,00
Jumlah Belanja	243.054.420.425	213.878.122.443	13,64

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp145.682.428.019,-

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal TA 2016 dan TA 2015 adalah masing-masing sebesar Rp145.682.428.019,- dan Rp61.568.142.189,- mengalami kenaikan sebesar 57,74 persen dibandingkan Realisasi TA 2015. Belanja Gedung dan Bangunan ini berasal dari penambahan nilai gedung dan bangunan pada Satker Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor di Bekasi (025734).

*Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA
2016 dan 2015*

URAIAN JENIS BELANJA	T.A 2016	T.A 2015	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	127.272.892.900	61.568.142.189	51,63
Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	18.409.535.119	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	145.682.428.019	61.568.142.189	57,74
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja	145.682.428.019	61.568.142.189	57,74

Rincian penambahan nilai gedung dan bangunan, sebagai berikut:

Kegiatan	Jumlah
Peningkatan Gedung Utama (Renovasi Gedung Utama) termasuk supervisi	13,354,269,730
Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Pendukung Alat Uji Emisi Gas Buang Spd Mtr dgn Vol Silinder s.d 2500 cc termasuk supervisi	5,055,265,389
Total	18,409,535,119

Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Rp11.051.056.650,
-

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2016 dan TA 2015 adalah masing-masing sebesar Rp11.051.056.650,- dan Rp1.241.413.231,-. Realisasi TA 2016 mengalami kenaikan sebesar 790,20 persen dibandingkan TA 2015. Hal ini disebabkan penambahan jalan dan jembatan dalam rangka mendukung rencana strategis.

Perbandingan Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2016 dan 2015

URAIAN JENIS BELANJA	T.A 2016	T.A 2015	Naik (Turun)
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	11.051.056.650	1.241.413.231	790,20
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	11.051.056.650	1.241.413.231	790,20
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja	11.051.056.650	1.241.413.231	790,20

Rincian belanja modal jalan dan jembatan, sebagai berikut:

Satker	Kegiatan	Jumlah
Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor di Bekasi	Pembangunan Jalan Beton di Kawasan Gedung Pengujian	1.506.701.000
Balai LLAJSDP Denpasar	Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan LLAJ	9.544.355.650
Total		11.051.056.650

Belanja Modal Lainnya
Rp924.227.624.337,-

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2016 dan TA 2015 adalah masing-masing sebesar Rp924.227.624.337,- dan Rp1.043.110.729.459,-. Realisasi TA 2016 mengalami penurunan sebesar 13 persen dibandingkan TA 2015.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2016 dan 2015

URAIAN JENIS BELANJA	T.A 2016	T.A 2015	Naik (Turun) %
Belanja <i>Software</i>	0	0	0,00
Belanja Modal Lainnya	924.227.624.337	1.043.110.729.459	0,00
Jumlah Belanja Kotor	924.227.624.337	1.043.110.729.459	(12,86)
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja	924.227.624.337	1.043.110.729.459	(12,86)

Belanja Bantuan Sosial
Rp0,-

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Belanja Bantuan Sosial adalah belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Bantuan ini diberikan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial yaitu rendahnya tingkat pendidikan dan ekonomi yang disebabkan karena banyaknya daerah miskin.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp3.281.206,-*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp3.281.206,- dan Rp34.956.823,- yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2016 dan
2015*

No.	Wilayah	31 Des 2016	31 Des 2015
1	Wilayah DKI Jakarta	Rp -	Rp -
2	Wilayah Jawa Barat	Rp -	Rp 26.771.655
3	Wilayah Jawa Timur	Rp 3.281.206	Rp -
4	Wilayah Kalimantan Barat	Rp -	Rp 94.000
5	Wilayah Sulawesi Utara	Rp -	Rp 5.840.000
6	Wilayah Papua Barat	Rp -	Rp 2.251.168
Jumlah		Rp 3.281.206	Rp 34.956.823

*Kas di
Bendahara
Penerimaan
Rp41.182.255,-*

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar masing-masing Rp41.182.255,- dan Rp37.905.850,-. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

*Perbandingan Rincian Kas di Bendahara Penerimaan TA 2016
dan 2015*

Keterangan	Tahun 2016	Tahun 2015
UPT Kariangu	41.182.255	37.905.850
Jumlah	41.182.255	37.905.850

Kas Lainnya dan Setara Kas Rp13.424.945,-

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp13.424.945,- dan Rp0,-. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

Perbandingan Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2016 dan 2015

Keterangan	Tahun 2016	Tahun 2015
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	13.424.945	-
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas Lainnya dari Hibah	-	-
Jumlah	13.424.945	-

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas yang berasal dari kas Lainnya di bendahara pengeluaran terdapat pada satker Perhubungan Darat Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp5.943,- dan Satker Perhubungan Darat Provinsi Papua Barat sebesar Rp13.419.002,-.

Piutang PNB
Rp0,-

C.4 Piutang PNB

Saldo Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp1.931.156.488,-. Piutang bukan pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak disajikan sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Piutang PNB TA 2016 dan 2015

Uraian	TH 2016	TH 2015
Piutang PNB	-	1.931.156.488
Piutang Lainnya	-	-
Jumlah	-	1.931.156.488

<p><i>Bagian Lancar Tagihan</i></p> <p><i>TP/TGR Rp0,-</i></p>	<p>C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)</p> <p>Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang.</p>
<p><i>Bagian Lancar TPA</i></p> <p><i>Rp0,-</i></p>	<p>C.6 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Penjualan Angsuran</p> <p>Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang.</p>
<p><i>Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar</i></p> <p><i>Rp0,-</i></p>	<p>C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar</p> <p>Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-.</p> <p>Penyisihan piutang tak tertagih – piutang lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur.</p>
<p><i>Belanja Dibayar di Muka</i></p> <p><i>Rp0,-</i></p>	<p>C.8 Beban Dibayar di Muka</p> <p>Saldo Beban Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp11.916.667,-. Beban dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Beban Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:</p>

*Perbandingan Rincian Beban Dibayar di Muka TA 2016 dan
2015*

JENIS	TH 2016	TH 2015
Pembayaran Internet	-	-
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin	-	11.916.667
Pembayaran Sewa Gedung dan Bangunan	-	-
Jumlah	-	11.916.667

Pendapatan

*yang Masih
Harus Diterima
Rp0,-*

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,- merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diterima tagihannya.

Persediaan

*Rp3.410.889.660
.704*

C.10 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp3.410.889.660.704,- dan Rp4.035.484.582.009,-.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Persediaan TA 2016 dan 2015

No.	Wilayah	31 Des 2016	31 Des 2015
1	Barang Konsumsi	Rp 1.080.822.830	Rp 715.021.541
2	Bahan untuk Pemeliharaan	Rp 39.569.500	Rp 25.514.308
3	Suku Cadang	Rp 132.500	Rp 1.821.500
4	Pita Cukai, Meterai, dan <i>Leges</i>	Rp 2.254.000	Rp 600.000
5	Tanah Bangunan untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat	Rp 1.377.497.023.505	Rp 675.836.683.997
6	Peralatan dan Mesin untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat	Rp 941.108.695.277	Rp 613.121.569.815
7	Jalan, Irigasi, dan Jaringan untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat	Rp 831.895.646.461	Rp 2.173.657.186.257
8	Aset Tetap Lainnya untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat	Rp 238.802.072.201	Rp 530.795.647.217
9	Aset Lain-lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	Rp 1.184.887.000	Rp 393.332.000
10	Barang Persediaan Lainnya untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat	Rp -	Rp 33.373.080.300
11	Persediaan Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat (Dalam Proses)	Rp 14.377.642.630	Rp -
12	Bahan Baku	Rp -	Rp 5.455.774
13	Persediaan Lainnya	Rp 4.900.914.800	Rp 7.558.669.300
Jumlah		Rp 3.410.889.660.704	Rp 4.035.484.582.009

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Tagihan

TP/TGR Rp0,-.

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan GantiRugi (TP/TGR) per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Tagihan Penjualan Angsuran **C.12 Tagihan Penjualan Angsuran**
Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih **C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Non Lancar**
Saldo Penyisihan Piutang tak Tertagih- Piutang Non Lancar per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Penyisihan Piutang tak Tertagih–Piutang Non Lancar merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Tanah **C.14 Tanah**
Rp493.424.519.575,-
5,-
Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Direktorat Jenderal Perhubungan Darat per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp493.424.519.575,- dan Rp488.074.753.575,-. Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2015	Rp	488.074.753.575
Mutasi Tambah :		
Pembelian	Rp	4.817.084.000
Hibah	Rp	-
Revaluasi	Rp	532.682.000
Mutasi Kurang :		
Penghapusan	Rp	-
Revaluasi	Rp	-
Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2016	Rp	493.424.519.575
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2016	Rp	-
Nilai Buku per 31 Desember 2016	Rp	493.424.519.575

Mutasi tambah:

- Pembelian tanah pada tahun 2016 pada Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Pagimana dengan nilai

perolehan sebesar Rp4.817.084.000,- dengan luas 5.442 m² terletak di Jalan Trans Sulawesi KM. 15, Kel. Taipa, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Tanah tersebut rencananya akan digunakan untuk Bangunan Gedung Kantor.

- Revaluasi atas tanah pada Balai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan Palu sebesar Rp532.682.000,-.

Peralatan dan Mesin **C.15 Peralatan dan Mesin**

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp5.388.113.204.230,- dan Rp4.355.718.749.321,-. Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2015		Rp	4.355.718.749.321
Mutasi Tambah :			
Saldo awal	Rp	733.000.000	
Pembelian	Rp	21.950.005.538	
Transfer Masuk	Rp	3.607.784.655.200	
Penyelesaian Pembangunan dg KDP	Rp	961.041.933.875	
Reklasifikasi Masuk	Rp	1.328.116.549.481	
Pengembangan Nilai Aset	Rp	65.125.000	
Mutasi Kurang :			
Penghentian aset dari penggunaan	Rp	(912.577.582.523)	
Penghapusan	Rp	(21.241.001.754)	
Transfer Keluar	Rp	(3.649.130.076.109)	
Reklasifikasi Keluar	Rp	(300.980.725.003)	
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	Rp	(18.401.982)	
Transaksi Normalisasi BMN Aset Tetap	Rp	(1.391.200.814)	
Reklasifikasi BMN ke BPYBDS	Rp	(1.957.826.000)	
Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2016	Rp	5.388.113.204.230	
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2016	Rp	-	
Nilai Buku per 31 Desember 2016	Rp	5.388.113.204.230	

Mutasi tambah:

- Saldo Awal** berupa Micro Bus di Balai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sungai, Danau dan Penyeberangan Jambi senilai Rp733.000.000,-.

b. Pembelian Peralatan dan Mesin yang terdapat pada:

- Sekretariat Perhubungan Darat senilai total Rp4.835.475.489,-;
- Direktorat Angkutan dan Multimoda Perhubungan Darat senilai Rp248.990.000,-;
- Direktorat Pembinaan Keselamatan Perhubungan Darat senilai Rp1.255.248.000,-;
- Direktorat Lalu Lintas Perhubungan Darat senilai Rp270.932.035,-;
- Direktorat Sarana Perhubungan Darat senilai Rp291.978.314,-;
- Direktorat Prasarana Perhubungan Darat senilai Rp234.751.880,-;
- Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bekasi senilai Rp755.833.013,-;
- Satker Perhubungan Darat Provinsi Jawa Barat senilai Rp145.999.600,-;
- Satker Perhubungan Darat Provinsi Jawa Tengah senilai Rp128.450.000,-;
- Satker Perhubungan Darat Provinsi D.I. Yogyakarta senilai Rp129.168.036,-;
- Satker Perhubungan Darat Provinsi Jawa Timur senilai Rp102.505.736,-;
- Satker Perhubungan Darat Provinsi Aceh senilai Rp120.503.000,-;
- Satker Perhubungan Darat Provinsi Sumatera Utara senilai Rp110.857.700,-;
- Satker Perhubungan Darat Provinsi Sumatera Barat senilai Rp146.966.000,-;
- Satker Perhubungan Darat Provinsi Riau senilai Rp142.797.200,-;
- Balai LLAJSDP Jambi senilai Rp632.765.544,-;

- Satker Perhubungan Darat Provinsi Sumatera Selatan senilai Rp150.811.500,-;
- Satker Perhubungan Darat Provinsi Lampung senilai Rp146.000.000,-;
- Satker Perhubungan Darat Provinsi Kalimantan Barat senilai Rp144.299.475,-;
- Balai LLAJSDP Palangkaraya senilai Rp411.083.380,-;
- Satker Perhubungan Darat Provinsi Kalimantan Selatan senilai Rp145.033.937,-;
- Satker Perhubungan Darat Provinsi Kalimantan Timur senilai Rp137.328.688,-;
- Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Kariangu senilai Rp391.543.000,-;
- Satker Perhubungan Darat Provinsi Sulawesi Utara senilai Rp162.000.000,-;
- Balai LLAJSDP Palu senilai Rp1.171.340.362,-;
- Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Pagimana senilai Rp3.325.126.746,-;
- Satker Perhubungan Darat Provinsi Sulawesi Selatan senilai Rp134.397.999,-;
- Satker Perhubungan Darat Provinsi Sulawesi Tenggara senilai Rp140.441.500,-;
- Satker Perhubungan Darat Provinsi Maluku senilai Rp137.586.476,-;
- Balai LLAJSDP Denpasar senilai Rp401.094.800,-;
- Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk senilai Rp831.232.465,-;
- Satker Perhubungan Darat Provinsi NTB senilai Rp146.608.000,-;
- Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Lembar senilai Rp1.537.060.800,-;
- Satuan Kerja Perhubungan Darat Provinsi NTT senilai Rp133.942.000,-;

- Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Kalabahi senilai Rp148.500.000,-;
- Satker Perhubungan Darat Provinsi Papua senilai Rp151.000.000,-;
- Satker Perhubungan Darat Provinsi Bengkulu senilai Rp132.770.000,-;
- Satker Perhubungan Darat Provinsi Maluku Utara senilai Rp150.396.660,-;
- Satker Perhubungan Darat Provinsi Banten senilai Rp135.350.000,-;
- Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Merak senilai Rp615.541.800,-;
- Satker Perhubungan Darat Provinsi Bangka Belitung senilai Rp163.984.959,-;
- Satker Perhubungan Darat Provinsi Gorontalo senilai Rp95.353.256,-;
- Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo senilai Rp568.975.000,-;
- Satker Perhubungan Darat Provinsi Kep. Riau senilai Rp150.822.500,-;
- Satker Perhubungan Darat Provinsi Papua Barat senilai Rp149.800.000,-;
- Satker Perhubungan Darat Provinsi Sulawesi Barat senilai Rp149.930.000,-;
- Satker Perhubungan Darat Provinsi Kalimantan Utara senilai Rp137.428.688,-.

c. **Transfer Masuk yang terdapat pada:**

- Direktorat Angkutan dan Multimoda Perhubungan Darat senilai Rp1.312.329.597.195,-;
- Direktorat Pembinaan Keselamatan Perhubungan Darat senilai Rp11.312.276.100,-;
- Direktorat Lalu Lintas Perhubungan Darat senilai Rp587.831.771.716,-;

- Direktorat Sarana Perhubungan Darat senilai Rp80.408.409.783,-;
- Direktorat Prasarana Perhubungan Darat senilai Rp37.960.228.011,-;
- Balai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan Jambi senilai Rp300.822.856.024,-;
- Balai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan Palangkaraya senilai Rp183.739.645.406,-;
- Balai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan Palu senilai Rp793.470.124.175;
- Balai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan Denpasar senilai Rp299.909.746.790,-;

d. Penyelesaian Pembangunan dengan KDP yang terdapat pada:

- Direktorat Angkutan dan Multimoda Perhubungan Darat senilai Rp119.952.149.400,-;
- Direktorat Pembinaan Keselamatan Perhubungan Darat senilai Rp48.227.338.832,-;
- Direktorat Lalu Lintas Perhubungan Darat senilai Rp47.719.469.099,-;
- Direktorat Sarana Perhubungan Darat senilai Rp4.220.210.500,-;
- Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bekasi senilai Rp97.697.893.000,-;
- Satker Perhubungan Darat Provinsi Jawa Barat senilai Rp28.666.904.670,-;
- Satker Perhubungan Darat Provinsi Jawa Tengah senilai Rp20.242.782.935,-;
- Satker Perhubungan Darat Provinsi D.I. Yogyakarta senilai Rp12.707.091.062,-;
- Satker Perhubungan Darat Provinsi Jawa Timur senilai Rp15.038.140.000,-;

- Satker Perhubungan Darat Provinsi Aceh senilai Rp33.028.211.000,-;
- Satker Perhubungan Darat Provinsi Sumatera Utara senilai Rp33.993.808.233,-;
- Satker Perhubungan Darat Provinsi Sumatera Barat senilai Rp20.543.047.000,-;
- Satker Perhubungan Darat Provinsi Riau senilai Rp35.384.594.000,-;
- Balai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan Jambi senilai Rp28.642.041.000,-;
- Satker Perhubungan Darat Provinsi Sumatera Selatan senilai Rp16.124.081.000,-;
- Satker Perhubungan Darat Provinsi Lampung senilai Rp23.107.865.600,-;
- Satker Perhubungan Darat Provinsi Kalimantan Barat senilai Rp23.041.802.000,-;
- Balai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan Palangkaraya senilai Rp28.642.041.000,-;
- Satker Perhubungan Darat Provinsi Kalimantan Selatan senilai Rp15.907.136.600,-;
- Satker Perhubungan Darat Provinsi Kalimantan Timur senilai Rp21.545.430.000,-;
- Satker Perhubungan Darat Provinsi Sulawesi Utara senilai Rp42.189.081.000,-;
- Balai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan Palu senilai Rp11.741.292.459,-;
- Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Pagimana senilai Rp864.765.000,-;
- Satker Perhubungan Darat Provinsi Sulawesi Selatan senilai Rp20.648.051.300,-;
- Satker Perhubungan Darat Provinsi Sulawesi Tenggara senilai Rp11.827.448.000,-;

- Balai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan Denpasar senilai Rp9.362.372.750,-
- Satker Perhubungan Darat Provinsi NTB senilai Rp15.600.748.000,-;
- Satker Perhubungan Darat Provinsi NTT senilai Rp38.929.073.000,-;
- Satker Perhubungan Darat Provinsi Papua senilai Rp24.550.951.400,-;
- Satker Perhubungan Darat Provinsi Bengkulu senilai Rp12.489.099.000,-;
- Satker Perhubungan Darat Provinsi Maluku Utara senilai Rp24.337.898.000,-;
- Satker Perhubungan Darat Provinsi Banten senilai Rp12.908.047.400,-;
- Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Merak senilai Rp445.500.000,-;
- Satker Perhubungan Darat Provinsi Bangka Belitung senilai Rp9.534.427.500,-;
- Satker Perhubungan Darat Provinsi Gorontalo senilai Rp10.692.077.100,-;
- Satker Perhubungan Darat Provinsi Kep. Riau senilai Rp11.268.072.241,-;
- Satker Perhubungan Darat Provinsi Papua Barat senilai Rp17.087.341.000,-;
- Satker Perhubungan Darat Provinsi Sulawesi Barat senilai Rp21.128.628.894,-;
- Satker Perhubungan Darat Provinsi Kalimantan Utara senilai Rp8.271.720.900,-.

e. Reklasifikasi Masuk yang terdapat pada:

- Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebesar Rp26.426.603.700,-;
- Direktorat Angkutan dan Multimoda Perhubungan Darat sebesar Rp454.109.008.475,-;

- Direktorat Pembinaan Keselamatan Perhubungan Darat berupa Jembatan Timbang kapasitas 10 Ton senilai Rp216.700.000,-;
- Direktorat Lalu Lintas Perhubungan Darat senilai Rp441.965.335.557,-;
- Direktorat Sarana Perhubungan Darat senilai Rp157.429.431.130,-;
- Direktorat Prasarana Perhubungan Darat senilai Rp2.291.766.960,-;
- Satker Perhubungan Darat Provinsi DI Yogyakarta senilai Rp12.152.672.749,-;
- Balai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan Jambi senilai Rp10.516.254.946,-;
- Satker Perhubungan Darat Provinsi Sumatera Selatan senilai Rp13.937.333.300,-;
- Balai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan Palangkaraya senilai Rp27.112.677.000,-;
- Satker Perhubungan Darat Provinsi Kalimantan Selatan senilai Rp15.907.136.600,-;
- Satker Perhubungan Darat Provinsi Kalimantan Timur senilai Rp21.920.430.000,-;
- Balai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan Palu senilai Rp22.234.265.200,-;
- Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Pagimana senilai Rp375.265.000,-;
- Satker Perhubungan Darat Provinsi Sulawesi Selatan senilai Rp17.258.516.370,-;
- Satuan Kerja Perhubungan Darat Provinsi Maluku senilai Rp820.016.000,-;
- Balai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan Denpasar senilai Rp79.152.871.064,-;

- Satker Perhubungan Darat Provinsi Papua senilai Rp3.878.943.804,-;
- Satker Perhubungan Darat Provinsi Gorontalo senilai Rp10.656.760.940,-;
- Satker Perhubungan Darat Provinsi Kep. Riau senilai Rp3.562.510.604,-;
- Satker Perhubungan Darat Provinsi Kalimantan Utara senilai Rp6.192.050.082,-.

f. Transaksi Normalisasi BMN Aset Tetap terdapat pada:

- Pengembangan LLAJ Riau (Satker Likuidasi) senilai Rp197.000.000,-;
- Pengembangan LLAJ Maluku (Satker Likuidasi) senilai Rp1.689.774.000,-;

g. Pengembangan Nilai Aset terdapat pada Balai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan Palu senilai Rp65.125.000,-.

h. Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas terdapat pada Balai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan Palu senilai Rp98.230.000,-.

Mutasi kurang:

a. Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas terdapat pada:

- Setditjen Perhubungan Darat berupa Gordyjn/Kray senilai Rp16.903.017;
- Direktorat Lalu Lintas Perhubungan Darat berupa Traffic Light senilai Rp76.188.765;
- Direktorat Sarana Perhubungan Darat berupa Alat Penguji Kendaraan Bermotor Lainnya dan Universal Test Machine senilai Rp23.540.000 dan Rp200;
- Balai LLAJSDP Palu senilai Rp98.230.000;

b. Penghapusan Peralatan dan Mesin terdapat pada:

- Direktorat Angkutan dan Multimoda Perhubungan Darat berupa Personal Computer senilai Rp73.507.500;
- Balai LLAJSDP Palu berupa Rambu Jalan senilai Rp21.167.494.254.

c. Reklasifikasi Keluar terdapat pada:

- Direktorat Angkutan dan Multimoda berupa Micro Bus senilai Rp116.977.800.000 dan GPS senilai Rp2.974.349.400;
- Satker Perhubungan Darat Provinsi D.I. Yogyakarta senilai Rp12.707.091.062;
- Balai LLAJSDP Jambi senilai Rp11.375.343.000;
- Satker Perhubungan Darat Provinsi Sumatera Selatan senilai Rp16.124.081.000;
- Balai LLAJSDP Palangkaraya senilai Rp27.449.051.000;
- Satker Perhubungan Darat Provinsi Kalimantan Selatan senilai Rp15.907.136.600;
- Satker Perhubungan Darat Provinsi Kalimantan Timur senilai Rp21.545.430.000;
- Balai LLAJSDP Palu senilai Rp98.230.000;
- Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Pagimana senilai Rp375.265.000;
- Satker Perhubungan Darat Provinsi Sulawesi Selatan senilai Rp20.648.051.300;
- Satker Perhubungan Darat Provinsi Papua senilai Rp24.550.951.400;
- Satker Perhubungan Darat Provinsi Gorontalo senilai Rp10.692.077.100;
- UPT Gorontalo senilai Rp16.075.000;
- Satker Perhubungan Darat Provinsi Kep. Riau senilai Rp11.268.072.241;
- Satker Perhubungan Darat Provinsi Kalimantan Utara senilai Rp8.271.720.900;

d. Penghentian Aset dari Penggunaan terdapat pada:

- Direktorat Angkutan dan Multimoda Perhubungan Darat berupa Bus senilai Rp347.124.577.275 dan Micro Bus senilai Rp135.397.099.060;
- Direktorat Lalu Lintas Perhubungan Darat senilai Rp22.388.790.450;

- Direktorat Sarana Perhubungan Darat senilai Rp55.997.532.480;
 - Balai LLAJSDP Jambi senilai Rp85.443.165.807;
 - Balai LLAJSDP Palangkaraya senilai Rp22.502.381.640;
 - Satker Perhubungan Darat Provinsi Kalimantan Timur senilai Rp375.000.000;
 - Balai LLAJSDP Palu senilai Rp202.337.921.181;
 - Balai LLAJSDP Denpasar senilai Rp41.011.114.630;
- e. Transaksi Normalisasi BMN Aset Tetap terdapat pada:**
- Direktorat Lalu Lintas Lalu Lintas Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan senilai Rp1.121.192.120;
 - Direktorat Sarana Lalu Lintas Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan senilai Rp2.056.659.814;
 - Direktorat Prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan senilai Rp100.122.880;
- f. Transfer Keluar terdapat pada:**
- Direktorat Lalu Lintas Perhubungan Darat senilai Rp1.004.922.868.841;
 - Pengembangan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan (satker likuidasi) senilai Rp1.382.235.600;
 - Direktorat Sarana Perhubungan Darat senilai Rp1.303.512.593.222;
 - Direktorat Prasarana Perhubungan Darat Rp102.567.678.249;
 - Pengembangan LLAJ Jawa Tengah (satker likuidasi) senilai Rp50.479.206.299;
 - Pengembangan LLASDP Jawa Tengah (satker likuidasi) senilai Rp80.800.000;
 - Pengembangan LLAJ D.I. Yogyakarta (satker likuidasi) senilai Rp6.668.315.600;

- Pengembangan LLASDP DI Yogyakarta (satker likuidasi) senilai Rp124.478.500;
- Pengembangan LLAJ Jawa Timur (satker likuidasi) senilai Rp78.281.171.064;
- Pengembangan LLASDP Jawa Timur (satker likuidasi) senilai Rp50.000.000;
- Pengembangan LLAJ Aceh (satker likuidasi) senilai Rp31.633.280.250;
- Pengembangan LLASDP Aceh (satker likuidasi) senilai Rp692.157.500;
- Pengembangan LLAJ Sumatera Utara (satker likuidasi) senilai Rp49.805.018.121;
- Pengembangan LLASDP Sumatera Utara (satker likuidasi) senilai Rp104.350.000;
- Pengembangan LLAJ Sumatera Barat (satker likuidasi) senilai Rp19.338.433.000;
- Pengembangan LLASDP Sumatera Barat (satker likuidasi) senilai Rp82.998.000;
- Pengembangan LLAJ Riau (satker likuidasi) senilai Rp43.283.527.797;
- Pengembangan LLASDP Riau (satker likuidasi) senilai Rp138.101.750;
- Satker Perhubungan Darat Provinsi Lampung (satker likuidasi) senilai Rp23.600.299.000;
- Pengembangan LLASDP Lampung (satker likuidasi) senilai Rp164.790.000;
- Pengembangan LLAJ Kalimantan Barat (satker likuidasi) senilai Rp117.284.440.000;
- Pengembangan LLASDP Kalimantan Barat (satker likuidasi) senilai Rp10.068.433.000;
- Pengembangan LLASDP Kalimantan Selatan (satker likuidasi) senilai Rp555.136.750;
- Satker Perhubungan Darat Provinsi Kalimantan Timur senilai Rp33.136.339.016;

- Pengembangan LLASDP Kalimantan Timur (satker likuidasi) senilai Rp192.915.000;
- Pengembangan LLAJ Sulawesi Utara (satker likuidasi) senilai Rp101.652.532.600;
- Pengembangan LLASDP Sulawesi Utara (satker likuidasi) senilai Rp66.489.476.600;
- Pengembangan LLAJ Sulawesi Selatan (satker likuidasi) senilai Rp8.942.355.000;
- Pengembangan LLASDP Sulawesi Selatan (satker likuidasi) senilai Rp131.487.500;
- Pengembangan LLAJ Sulawesi Tenggara (satker likuidasi) senilai Rp7.930.307.000;
- Pengembangan LLASDP Sulawesi Tenggara (satker likuidasi) senilai Rp201.987.000;
- Pengembangan Sarana LLASDP Maluku (satker likuidasi) senilai Rp121.135.248.000;
- Pengembangan LLAJ Maluku (satker likuidasi) senilai Rp38.280.493.334;
- Pengembangan LLASDP Maluku (satker likuidasi) senilai Rp373.005.000;
- Pengembangan LLAJ NTT (satker likuidasi) senilai Rp69.742.740.363;
- Pengembangan LLASDP NTT (satker likuidasi) senilai Rp38.736.971.448;
- Pengembangan LLAJ Papua (satker likuidasi) senilai Rp20.022.805.600;
- Pengembangan LLASDP Papua (satker likuidasi) senilai Rp50.000.000;
- Pengembangan LLAJ Bengkulu (satker likuidasi) senilai Rp11.953.335.000;
- Pengembangan LLASDP Bengkulu (satker likuidasi) senilai Rp91.496.900;
- Pengembangan LLAJ Maluku Utara (satker likuidasi) senilai Rp3.495.228.000;

- Pengembangan LLASDP Maluku Utara (satker likuidasi) senilai Rp233.290.000;
 - Pengembangan LLAJ Bangka Belitung (satker likuidasi) senilai Rp16.628.797.000;
 - Pengembangan LLASDP Bangka Belitung (satker likuidasi) senilai Rp106.771.500;
 - Pengembangan LLAJ Gorontalo (satker likuidasi) senilai Rp15.496.670.166;
 - Pengembangan LLAJ Kepulauan Riau (satker likuidasi) senilai Rp12.948.797.399;
 - Pengembangan LLASDP Kepulauan Riau (satker likuidasi) senilai Rp28.572.626.000;
 - Pengembangan LLAJ Papua Barat (satker likuidasi) senilai Rp77.202.352.333;
 - Pengembangan LLASDP Papua Barat (satker likuidasi) senilai Rp5.893.095.650;
 - Pengembangan LLAJ Sulawesi Barat (satker likuidasi) senilai Rp124.300.790.157;
 - Pengembangan LLASDP Sulawesi Barat (satker likuidasi) senilai Rp367.850.000,-.
- g. **Reklasifikasi BMN ke BPYBDS** di Satker Perhubungan Darat Provinsi Maluku Utara senilai Rp1.957.826.000,-.

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Gedung dan Bangunan **C.16 Gedung dan Bangunan**

Bangunan Saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2016 dan 2015
Rp1.079.846.864.173,- adalah Rp1.079.846.864.178,- dan Rp968.209.908.380,-.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2015	Rp	968.209.908.380
Mutasi Tambah :		
Penyelesaian Pembangunan dgn KDP	Rp	72.147.070.213
Transfer Masuk	Rp	884.414.399.519
Reklasifikasi Masuk	Rp	89.180.543.305
Pengembangan Nilai Aset	Rp	448.821.389
Pengembangan melalui KDP	Rp	14.687.850.730
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	Rp	10.304.452
Mutasi Kurang :		
Penghentian aset dari penggunaan	Rp	(245.315.452.313)
Koreksi Pencatatan	Rp	-
Transfer Keluar	Rp	(694.121.392.497)
Reklasifikasi Keluar	Rp	(9.815.189.000)
Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2016	Rp	1.079.846.864.178
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2016	Rp	-
Nilai Buku per 31 Desember 2016	Rp	1.079.846.864.178

Mutasi Tambah:

a. Penyelesaian Pembangunan dengan KDP sebesar Rp72.147.070.213 terdapat pada:

- Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor Bekasi berupa Bangunan Gedung Laboratorium Permanen senilai Rp9.027.942.000.
- Satker Perhubungan Darat Provinsi Jawa Tengah berupa Guardrail senilai Rp1.372.646.565 dan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen senilai Rp6.094.160.000.
- Satker Perhubungan Darat Provinsi Jawa Timur berupa Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/ Bandara Permanen senilai Rp33.981.195.000.
- Balai LLAJSDP Palu berupa Guardrail senilai Rp5.475.667.542.
- Satker Perhubungan Darat Prov. Maluku berupa Guardrail senilai Rp9.785.419.000.
- Satker Perhubungan Darat Prov. NTB berupa Bangunan/Shelter senilai Rp949.071.000.

- Satker Perhubungan Darat Provinsi Sulawesi Barat berupa Guardrail Rp5.460.971.106.
- b. Transfer Masuk sebesar Rp884.414.399.519 terdapat pada:**
- Direktorat Angkutan dan Multimoda berupa Bangunan Halte/Shelter senilai Rp3.261.200.000 dari Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan senilai Rp15.982.479.763,- dari Direktorat Bina Sarana Transportasi Perkotaan (BSTP).
 - Direktorat Lalu Lintas senilai Rp1.112.842.145,- berupa Guardrail dan senilai Rp30.102.851.299,- berupa Gedung Kantor Lainnya dari Direktorat LLAJ.
 - Direktorat Prasarana senilai Rp28.418.123.000,- berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen dan senilai Rp152.828.012.565,- berupa Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen dari Direktorat Keselamatan Transportasi Darat (KTD).
 - Direktorat Prasarana senilai Rp147.683.331.601,- berupa Bangunan Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen dari Pengembangan Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan (PTSDP).
 - Balai LLAJSDP Jambi senilai Rp2.094.636.000,- berupa Guardrail dari Pengembangan LLAJ Kep. Riau.
 - Balai LLAJSDP Jambi berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen senilai Rp194.398.000,- dari Pengembangan LLASDP Bangka Belitung dan senilai Rp1.086.446.000,- dari Pengembangan LLAJ NAD.
 - Balai LLAJSDP Jambi berupa Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen senilai Rp55.029.428.000,- dari Pengembangan LLAJ NAD, senilai Rp9.318.763.100,- dari Pengembangan LLASDP NAD, senilai Rp57.294.029.713,- dari Pengembangan LLASDP Sumatera Barat, dan senilai Rp285.691.000,- dari Pengembangan LLASDP Bangka Belitung.

- Balai LLAJSDP Jambi senilai Rp1.479.753.000,- berupa Rambu Suar dan senilai Rp1.792.398.000,- berupa Pelampung Suar dari Pengembangan LLASDP Kep. Riau.
- Balai LLAJSDP Jambi senilai Rp887.836.000,- berupa Rambu Berpuncak dari Pengembangan LLASDP Kep. Riau.
- Balai LLAJSDP Palu senilai Rp11.624.814.266,- berupa Guardrail, senilai Rp351.820.000 berupa Bangunan Gudang Tetutup Permanen, senilai Rp106.100.000,- berupa Gedung Pos Jaga Permanen dari Pengembangan LLAJ Maluku.
- Balai LLAJSDP Palu senilai Rp2.378.148.000,- berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen dari Pengembangan LLAJ Sulawesi Utara.
- Balai LLAJSDP Palu senilai Rp6.810.670.000,- berupa Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen dan senilai Rp8.954.988.000,- berupa Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen dari Pengembangan LLAJ Maluku.
- Balai LLAJSDP Palu senilai Rp27.360.520.200,- berupa Bangunan Gedung Terminal/ Pelabuhan/Bandara Permanen dari Pengembangan LLAJ Sulawesi Barat.
- Balai LLAJSDP Palu berupa Bangunan Halte/Shelter senilai Rp1.460.440.000,- dari Pengembangan LLAJ Sulawesi Utara, senilai Rp2.489.216.000,- dari Pengembangan LLAJ Maluku, senilai Rp852.497.000,- dari Pengembangan LLAJ Gorontalo.
- Balai LLAJSDP Palu berupa Rambu Suar senilai Rp4.513.892.000,- dari, senilai Rp6.012.712.636,- dari Pengembangan LLASDP Sulawesi Selatan, senilai Rp1.925.700.000,- dari Pengembangan LLASDP Maluku, senilai Rp1.220.500.000,- dari Sulawesi Barat.

- Balai LLAJSDP Palu senilai Rp539.300.000,- berupa Pagar Permanen dari Pengembangan LLAJ Maluku.
- Balai LLAJSDP Palu senilai Rp672.750.000,- berupa Pagar Lainnya dari Pengembangan LLAJ Papua.
- Balai LLAJSDP Denpasar senilai Rp6.779.924.817,- berupa Guardrail dari Pengembangan LLAJ Jawa Tengah.
- Balai LLAJSDP Denpasar senilai Rp608.498.000,- berupa Bangunan Gedung Terminal/ Pelabuhan/Bandara Permanen, senilai Rp549.737.000,- berupa Menara Suar Listrik Diesel, dan senilai Rp1.555.545.000,- berupa Rambu Suar dari Pengembangan LLASDP Jawa Tengah.
- Balai LLAJSDP Denpasar senilai Rp2.139.750.000,- berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen dari Pengembangan LLASDP Lampung.
- Balai LLAJSDP Denpasar senilai Rp917.476.000,- berupa Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen, senilai Rp327.301.500,- berupa Bangunan Garasi/Pool Lainnya, dan senilai Rp555.039.000,- berupa Rambu Suar dari Pengembangan LLASDP Yogyakarta.
- Balai LLAJSDP Denpasar senilai Rp17.057.789.000,- berupa Bangunan Gedung Terminal/ Pelabuhan/Bandara Permanen dari Pengembangan LLAJ NTT.
- Balai LLAJSDP Denpasar senilai Rp845.436.000,- berupa Rambu Suar dari Pengembangan LLASDP NTT.
- Balai LLAJSDP Palangkaraya senilai Rp87.385.341.414,- berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen dan senilai Rp357.125.000,- berupa Rambu Suar dari Pengembangan LLASDP Kalimantan Timur.
- Balai LLAJSDP Palangkaraya berupa Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen senilai Rp80.350.734.000,- dari Pengembangan LLAJ Kalimantan Barat, senilai Rp32.499.721.000,- dari

Pengembangan LLAJ Kalimantan Timur, dan senilai Rp63.739.457.500,- dari Pengembangan LLASDP Kalimantan Timur.

c. Reklasifikasi masuk sebesar Rp89.180.543.305,- terdapat pada:

- Direktorat Lalu Lintas Perhubungan Darat senilai Rp3.018.369.000,- berupa Pagar Permanen dan senilai Rp1.096.392.000,- berupa Pagar Lainnya.
 - BLLAJSDP Jambi senilai Rp662.038.054,- berupa Guardrail.
 - Satker Perhubungan Darat Prov. Sumatera Selatan senilai Rp1.136.973.000,- berupa Guardrail.
 - Balai LLAJSDP Palu senilai Rp7.569.554.000,- berupa Rambu Suar.
 - Satker Perhubungan Darat Prov. Maluku senilai Rp7.184.277.000,-.
 - Satker Perhubungan Darat Prov. Papua senilai Rp19.209.412.173,- berupa Guardrail.
 - Satker Perhubungan Darat Prov. Kep. Riau senilai Rp3.549.352.169,- berupa Guardrail.
 - Satker Perhubungan Darat Prov. Kalimantan Utara senilai Rp2.079.670.818,- berupa Guardrail.
 - Balai LLAJSDP Palangkaraya senilai Rp336.374.000,- berupa Guardrail.
- d. **Pengembangan Nilai Aset** sebesar Rp448.821.389,- pada Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor Bekasi untuk aset Bangunan Gedung Laboratorium Permanen.
- e. **Pengembangan melalui KDP** sebesar Rp14.687.850.730,- pada Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor Bekasi.
- f. **Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas** di Balai LLAJSDP Jambi Rp(19.465.548),- dan di BLLAJSDP Palu senilai Rp29.770.000,- untuk aset Guardrail.

Mutasi kurang berupa:

a. Penghentian Aset dari Penggunaan sebesar Rp245.315.452.313,- terdapat pada:

- Balai LLAJSDP Jambi senilai Rp100.512.623.313,- berupa penghentian penggunaan aset Gedung/Kantor Permanen, Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen, dan Bangunan Fasilitas Umum Lainnya.
- Balai LLAJSDP Palu senilai Rp24.495.390.000,- berupa penghentian penggunaan aset Bangunan Gedung Kantor Permanen, Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen, Bangunan Halte/Shelter, dan Rambu Suar.
- Balai LLAJSDP Denpasar senilai Rp23.711.135.500,- berupa penghentian penggunaan aset Bangunan Gedung Kantor Permanen, Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen, Bangunan Gedung Garasi Lainnya, Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen, Menara Suar Listrik Diesel, dan Rambu Suar.
- Balai LLAJSDP Palangkaraya senilai Rp96.596.303.500,- berupa penghentian penggunaan aset Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen dan Rambu Suar.

b. Transfer Keluar sebesar Rp694.121.492.497,- yang terdapat pada:

- Direktorat BSTP (Likuidasi) senilai Rp15.982.479.763,- berupa Bangunan Halte/Shelter.
- Direktorat LLAJ (Likuidasi) senilai Rp234.757.797.300,-
- Direktorat LLASDP (Likuidasi) senilai Rp28.418.123.000,-.
- Pengembangan Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan (likuidasi) senilai Rp147.683.331.601,- berupa Bangunan Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen ke Direktorat Prasarana.

- Pengembangan LLAJ Jawa Tengah senilai Rp6.779.924.817,- berupa Guardrail ke Balai LLAJSDP Denpasar.
- Pengembangan LLAJ NAD senilai Rp1.086.446.000,- berupa Gedung Kantor Permanen ke Balai Jambi dan senilai Rp6.871.871.500,- berupa Bangunan Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen ke Balai LLAJSDP Jambi.
- Pengembangan LLASDP Sumatera Barat senilai Rp16.217.568.000,- berupa Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen ke Balai LLAJSDP Jambi.
- Pengembangan LLAJ Kalimantan Barat senilai Rp80.350.734.000,- berupa Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen ke Balai LLAJSDP Palangkaraya.
- Pengembangan LLASDP Kalimantan Timur senilai Rp87.385.341.414,- berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen ke Balai LLAJSDP Palangkaraya.
- Pengembangan LLAJ Sulawesi Utara senilai Rp3.869.100.000,- berupa Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen dan senilai Rp1.937.100.000,- berupa Bangunan Tempat Kerja Lainnya ke Balai LLAJSDP Palu.
- Pengembangan LLASDP Sulawesi Utara senilai Rp3.823.669.000,- berupa Rambu Suar ke Balai LLAJSDP Palu.
- Pengembangan LLASDP Sulawesi Selatan senilai Rp6.012.712.636,- berupa Rambu Suar ke Balai LLAJSDP Palu.
- Pengembangan LLAJ Maluku senilai Rp15.111.250.266,- berupa Guardrail, Bangunan Gudang Tertutup Permanen, Gedung Pos Jaga Permanen, Bangunan Halte/Shelter, dan Pagar Permanen ke Balai LLAJSDP Palu.

- Pengembangan LLASDP Maluku senilai Rp1.925.700.000,- berupa Rambu Suar ke Balai LLAJSDP Palu.
 - Pengembangan LLASDP NTT senilai Rp845.436.000,- berupa Rambu Suar ke Balai LLAJSDP Denpasar.
 - Pengembangan LLAJ Papua senilai Rp672.750.000,- berupa Pagar Lainnya ke Balai LLAJSDP Palu.
 - Pengembangan LLASDP Maluku Utara senilai Rp1.572.630.000,- berupa Rambu Suar ke Balai LLAJSDP Palu.
 - Pengembangan LLAJ Kep. Riau senilai Rp2.094.636.000,- berupa Guardrail.
 - Pengembangan LLASDP Kep. Riau senilai Rp3.362.371.000,- berupa Rambu Suar, Pelampung Suar, dan Rambu Berpuncak ke Balai LLAJSDP Jambi.
 - Pengembangan LLAJ Sulbar senilai Rp27.360.520.200,- berupa Bangunan/ Terminal/Pelabuhan/Bandara ke Balai LLAJSDP Palu.
- h. **Reklasifikasi Keluar** Guardrail senilai Rp29.770.000,- pada BLLAJSDP Palu dan senilai Rp9.785.419.000,- pada Satker Perhubungan Darat Prov. Maluku.

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp2.837.607.055.840,-

C.17 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp2.837.607.055.840,- dan Rp2.802.706.011.782,-. Saldo tersebut terdiri dari instalasi jaringan teknologi informasi.

Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2015		Rp	2.802.706.011.782
Mutasi Tambah :			
	Penyelesaian Pembangunan dgn KDP	Rp	105.982.326.050
	Koreksi Pencatatan	Rp	-
	Transfer Masuk	Rp	2.837.813.908.053
	Reklasifikasi Masuk	Rp	727.187.766.857
	Pengembangan melalui KDP	Rp	13.132.095.000
	Pembelian	Rp	26.500.000
Mutasi Kurang :			
	Penghentian Aset dari Penggunaan	Rp	(1.811.752.345.712)
	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	Rp	(123.395.508)
	Transfer Keluar	Rp	(1.753.249.329.198)
	Reklasifikasi Keluar	Rp	-
	Transaksi Normalisasi BMN Aset Tetap	Rp	(1.185.174.484)
	Reklasifikasi BMN ke BPYBDS	Rp	(82.931.307.000)
Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2016		Rp	2.837.607.055.840
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2016		Rp	-
Nilai Buku per 31 Desember 2016		Rp	2.837.607.055.840

Mutasi tambah Jalan dan Jembatan berupa:

a. Penyelesaian Pembangunan dengan KDP terdapat pada:

- Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bekasi berupa Jalan Khusus Komplek senilai Rp1.506.701.000,-;
- Satker Perhubungan Darat Provinsi Jawa Timur berupa Jembatan Timbang senilai Rp21.544.318.050,-;
- Satker Perhubungan Darat Provinsi Kalimantan Timur berupa Dermaga senilai Rp73.162.837.000,-.

b. Transfer Masuk terdapat pada:

- Direktorat Prasarana Perhubungan Darat berupa Dermaga senilai Rp193.102.803.810,- dan Jembatan Timbang senilai Rp5.540.340.300,-;
- Balai LLAJSDP Jambi berupa Dermaga senilai Rp344.653.855.326,- dan Jembatan Timbang senilai Rp1.571.248.000,-;
- Balai LLAJSDP Palangkaraya berupa Dermaga senilai Rp73.399.333.011,-;
- Balai LLAJSDP Palu berupa Dermaga senilai Rp1.096.803.268.585 dan Jembatan Labuh/Sandar pada

terminal lainnya senilai Rp1.926.781.330,- serta Jembatan Timbang senilai Rp8.407.610.000,-;

- Balai LLAJSDP Denpasar berupa Jalan Khusus Lainnya senilai Rp1.175.540.300,- dan Dermaga senilai Rp295.006.687.525,-;

c. Reklasifikasi Masuk terdapat pada:

- Direktorat Lalu Lintas Perhubungan Darat berupa Jembatan penyeberangan orang senilai Rp735.025.000,-;
- Balai LLAJSDP Palu berupa Dermaga senilai Rp215.752.255.650,- dan Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal Lainnya senilai Rp774.318.000,-;

Mutasi Kurang Jalan dan Jembatan berupa:

a. Penghentian Aset dari Penggunaan terdapat pada:

- Direktorat Prasarana Perhubungan Darat berupa Dermaga senilai Rp10.306.148.672,-;
- Satker LLASDP Kepri Perhubungan Darat (Satker Likuidasi) berupa Dermaga Rp277.798.184.951,- dan terdiri jembatan Timbang Rp.1.571.248.000,-;
- Satker Pengembangan LLASDP Kalimantan Timur perhubungan Darat (Satker Likuidasi) berupa Dermaga senilai Rp73.399.333.011,-;
- Satker LLAJ Gorontalo perhubungan Darat (Satker Likuidasi) berupa Dermaga senilai Rp774.806.020.440,- dan Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal Lainnya senilai Rp1.926.781.330,-;
- Satker LLASDP Solor Perhubungan Darat (Satker Likuidasi) berupa Jalan Khusus lainnya senilai Rp1.175.540.300,- dan Dermaga senilai Rp99.566.557.000,-;

b. Transfer Keluar terdapat pada:

- Pengembangan Transportasi SDP berupa Dermaga senilai Rp144.836.548.438,-;
- Direktorat Prasarana Perhubungan Darat berupa Dermaga senilai Rp37.960.106.700,-;

- Eks Direktorat Keselamatan Transportasi Darat (likuidasi) berupa Jembatan Penyeberangan Orang senilai Rp735.025.000,- dan Jembatan Timbang senilai Rp5.540.340.300,-;
 - Pengembangan LLASDP Sulut Perhubungan Darat berupa Dermaga senilai Rp248.387.388.310,-;
 - Pengembangan LLASDP Sulsel Perhubungan Darat (Satker Likuidasi) berupa Dermaga senilai Rp63.685.631.785,-;
 - Pengembangan LLASDP Sulawesi Tenggara Perhubungan Darat (Satker Likuidasi) berupa Dermaga senilai Rp56.977.985.000,-;
 - Pengembangan LLASDP Maluku Perhubungan Darat (Satker Likuidasi) berupa Dermaga Rp73.720.495.000,-;
 - Pengembangan LLASDP NTT Perhubungan Darat (Satker likuidasi) berupa Dermaga Rp154.008.147.200,-;
 - Pengembangan LLASDP Solor perhubungan Darat (Satker likuidasi) berupa Dermaga Rp41.431.983.325,-;
 - Pengembangan LLASDP Kepulauan Riau Perhubungan Darat (Satker likuidasi) berupa Dermaga Rp66.855.670.375,-;
 - Pengembangan LLASDP Papua Barat Perhubungan Darat (Satker likuidasi) berupa Dermaga Rp94.978.003.700,-;
 - Pengembangan LLAJ Sulawesi Barat Perhubungan Darat (Satker likuidasi) berupa Jembatan Timbang Rp8.407.610.000,-;
 - Pengembangan LLASDP Maluku Utara berupa Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal Lainnya senilai Rp774.318.000,-.
- c. Transaksi Normalisasi BMN Aset Tetap** terdapat pada Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bekasi berupa Jalan Khusus Inspeksi senilai Rp 1.185.174.484,-.
- d. Reklasifikasi BMN ke BPYBDS** terdapat pada Satker Perhubungan Darat Prov. Kalimantan Timur berupa Dermaga senilai Rp73.162.837.000,-.

Mutasi tambah Irigasi berupa:

a. Penyelesaian Pembangunan dengan KDP terdapat pada Satker Perhubungan Darat Provinsi Maluku Utara berupa Bangunan Dermaga senilai Rp9.768.470.000,-.

b. Transfer Masuk terdapat pada:

- Direktorat Prasarana Perhubungan Darat Bangunan Pemecah Gelombang senilai Rp202.464.693.366,- dan berupa Bangunan Dermaga senilai Rp2.069.660.000,-;
- Balai LLAJSDP Jambi berupa Bangunan Dermaga senilai Rp36.084.028.000,-;
- Balai LLAJSDP Palangkaraya berupa Bangunan Dermaga senilai Rp295.978.649.000,-;
- Balai LLAJSDP Palu berupa Bangunan Dermaga senilai Rp87.901.915.000,- dan Warning System senilai Rp1.147.970.000,-;
- Balai LLAJSDP Denpasar berupa Bangunan Waduk Irigasi Lainnya senilai Rp1.397.700.000,- dan Bangunan pemecah gelombang senilai Rp171.341.951.500,-.

c. Reklasifikasi Masuk terdapat pada:

- Direktorat Lalu Lintas Perhubungan Darat berupa Saluran Drainage senilai Rp94.214.000,-;
- Satker Perhubungan Darat Provinsi Kalimantan Timur berupa Bangunan Dermaga senilai Rp76.068.291.250,-;
- Balai LLAJSDP Palu berupa Bangunan Dermaga senilai Rp84.346.461.000,-;
- Balai LLAJSDP Denpasar berupa Bangunan Dermaga senilai Rp349.417.201.957,-;

d. Pengembangan melalui KDP terdapat pada UPT Kalabahi berupa Bangunan Dermaga Rp13.132.095.000,-

Mutasi Kurang Irigasi berupa:

a. Penghentian Aset dari Penggunaan terdapat pada:

- Balai LLAJSDP Jambi berupa Bangunan Dermaga senilai Rp36.084.028.000,-;

- Balai LLAJSDP Palangkaraya berupa Bangunan Dermaga senilai Rp126.978.579.000,-;
 - Satker Perhubungan Darat Provinsi Kalimantan Timur berupa Bangunan Dermaga senilai Rp76.068.291.250,-;
 - Balai LLAJSDP Palu berupa Bangunan Dermaga Rp87.901.915.000,-;
 - Balai LLAJSDP Denpasar berupa Bangunan waduk irigasi lainnya senilai Rp1.397.700.000,-, Bangunan Pemecah Gelombang senilai Rp125.736.169.500,-, dan Bangunan Dermaga senilai Rp111.554.460.258,-.
- b. Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas** terdapat pada UPT Kalabahi berupa Bangunan Dermaga senilai Rp123.395.508,-;
- c. Transfer Keluar** terdapat pada:
- Pengembangan Transportasi SDP (satker likuidasi) berupa Bangunan Pemecah gelombang senilai Rp178.214.750.866,-;
 - Direktorat Sarana Perhubungan Darat berupa saluran Drainase senilai Rp.94.214.000,-;
 - Prasarana Perhubungan Darat berupa Bangunan Pemecah Gelombang senilai Rp24.249.942.500,- dan Bangunan Dermaga senilai Rp2.069.660.000,-;
 - LLASDP Kalbar Perhubungan Darat (Satker Likuidasi) berupa Bangunan Dermaga Rp135.279.981.000,-;
 - Pengembangan LLASDP Jatim Perhubungan Darat (Satker Likuidasi) berupa Bangunan Dermaga Rp237.862.741.699,-.
 - Pengembangan LLASDP Kalsel Perhubungan Darat (Satker Likuidasi) Bangunan Dermaga Rp33.720.089.000,-;
 - Pengembangan LLAJ Maluku (Satker Likuidasi) Perhubungan Darat berupa Warning System Rp1.147.970.000,-;

- Pengembangan LLASDP NTT perhubungan Darat (Satker likuidasi) berupa Bangunan pemecah gelombang Rp45.605.782.000,-;
- Pengembangan LLASDP Maluku Utara Perhubungan Darat (Satker likuidasi) berupa Bangunan Dermaga Rp84.346.461.000,-.

d. Reklasifikasi BMN ke BPYBDS terdapat pada Satker Perhubungan Darat Prov. Maluku Utara berupa Bangunan Dermaga senilai Rp9.768.470.000,-.

Mutasi tambah Jaringan berupa:

a. Transfer Masuk senilai terdapat pada:

- Direktorat Sarana Perhubungan Darat berupa Instalasi Komputer senilai Rp15.200.000,-;
- Direktorat Prasarana Perhubungan Darat berupa Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya senilai Rp12.343.284.000,-;
- Balai LLAJSDP Denpasar berupa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) lainnya senilai Rp5.481.389.000,-.

b. Pembelian terdapat pada Sekretariat Jenderal Perhubungan Darat berupa Instalasi Penangkal Petir Manual senilai Rp26.500.000,-.

Mutasi Kurang Jaringan berupa:

a. Penghentian Aset dari Penggunaan terdapat pada Balai LLAJSDP Denpasar berupa Instalasi pembangkit listrik Tenaga Surya (PLTS) lainnya Rp5.481.389.000,-.

b. Transfer Keluar terdapat pada:

- Direktorat Lalu Lintas Perhubungan Darat berupa Instalasi komputer Rp15.200.000,-;
- Direktorat Sarana Perhubungan Darat berupa Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya Rp12.343.284.000,-.

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tetap Lainnya
Rp355.965.443.689,-

C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah Rp355.965.443.689,- dan Rp347.949.295.129,-.

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2015	Rp	347.949.295.129
Mutasi Tambah :		
Penambahan Aset Tetap Lainnya	Rp	-
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	Rp	71.874.800
Transfer Masuk	Rp	229.378.375.837
Aset Tetap dalam Renovasi	Rp	533.056.000
Penyelesaian Pembangunan dgn KDP	Rp	1.239.600.560
Mutasi Kurang :		
Penghentian aset dari penggunaan	Rp	(34.986.141.208)
Koreksi Pencatatan	Rp	(99.550.000)
Transfer Keluar	Rp	(188.121.067.429)
Reklasifikasi Keluar	Rp	-
Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2016	Rp	355.965.443.689
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2016	Rp	-
Nilai Buku per 31 Desember 2016	Rp	355.965.443.689

Mutasi tambah:

a. **Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas** terdapat pada Balai LLAJSDP Palu berupa Aset Tetap Lainnya dalam Renovasi senilai Rp71.874.800,-.

b. **Penambahan Aset Tetap Lainnya yang berasal dari Transfer Masuk terdapat pada:**

- Direktorat Angkutan dan Multimoda Perhubungan Darat berupa Laporan senilai Rp1.476.085.000,-;
- Direktorat Pembinaan Keselamatan Perhubungan Darat berupa Bahan Kartografi Lainnya senilai Rp788.590.000,-;
- Direktorat Lalu Lintas Perhubungan Darat berupa Laporan senilai Rp667.300.000,- dan Bahan Kartografi Lainnya senilai Rp1.150.000,-;

- Direktorat Prasarana Perhubungan Darat berupa Monografi senilai Rp14.944.833.719,- dan Mikrofisch senilai Rp3.604.049.680,-;
- Balai LLAJSDP Jambi berupa Buku Lainnya senilai Rp685.949.000,-.
- Direktorat Lalu Lintas Perhubungan Darat berupa Peralatan dan Mesin dalam Renovasi senilai Rp2.664.295.000,- Jalan, Irigasi, dan Jaringan dalam Renovasi senilai Rp686.675.000,- dan Aset Tetap Lainnya dalam Renovasi senilai Rp27.196.116.000,-;
- Direktorat Prasarana Perhubungan Darat berupa Gedung dan Bangunan dalam Renovasi senilai Rp6.845.779.000,- dan Aset Tetap Lainnya dalam Renovasi senilai Rp17.087.376.466,-;
- Balai LLAJSDP Jambi berupa Gedung dan Bangunan dalam Renovasi senilai Rp1.036.994.000,- dan Aset Tetap Lainnya dalam Renovasi senilai Rp24.931.425.192,-;
- Balai LLAJSDP Palangkaraya berupa Aset Tetap Lainnya dalam Renovasi senilai Rp44.811.613.080,-;
- Balai LLAJSDP Palu berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan Dalam Renovasi senilai Rp692.750.000,-; dan Aset Tetap Lainnya dalam Renovasi senilai Rp41.013.267.700,-;
- Balai LLAJSDP Denpasar berupa Aset Tetap Lainnya dalam Renovasi senilai Rp40.244.127.000,-.

c. Aset Tetap dalam Renovasi terdapat pada:

- Direktorat Lalu Lintas Perhubungan Darat berupa Aset Tetap Lainnya dalam Renovasi senilai Rp533.056.000,-;

d. Penyelesaian Pembangunan dengan KDP terdapat pada:

- Direktorat Angkutan dan Multimoda Perhubungan Darat berupa Laporan senilai Rp99.550.000,-;
- Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bekasi berupa Barang Bercorak Kesenian Lainnya senilai Rp1.140.050.560,-.

Mutasi kurang:

a. Mutasi kurang berasal dari Penghentian Aset dari Penggunaan terdapat pada:

- Direktorat Prasarana Perhubungan Darat berupa Aset Tetap Lainnya dalam Renovasi senilai Rp3.505.445.016,-
- Balai LLAJSDP Jambi berupa Aset Tetap Lainnya dalam Renovasi senilai Rp14.425.140.192,-;
- Balai LLAJSDP Denpasar berupa Aset Tetap Lainnya dalam Renovasi senilai Rp17.055.556.000,-.

b. Koreksi Pencatatan terdapat pada Direktorat Angkutan dan Multimoda Perhubungan Darat berupa Laporan senilai Rp99.550.000,-.

c. Transfer Keluar terdapat pada:

- Eks Direktorat Keselamatan Transportasi Perhubungan Darat (likuidasi) berupa Peralatan dan Mesin dalam Renovasi senilai Rp2.664.295.000,- Gedung dan Bangunan dalam Renovasi senilai Rp6.845.779.000,- Jalan, Irigasi, dan Jaringan dalam Renovasi senilai Rp686.675.000,- dan Aset Tetap Lainnya dalam Renovasi senilai Rp41.311.103.450,-;
- Eks Direktorat Keselamatan Transportasi Perhubungan Darat (likuidasi) berupa Monografi senilai Rp2.232.750.719,- Laporan senilai Rp2.143.385.000,- Mikrofisch senilai Rp3.604.049.680,- dan Bahan Kartografi Lainnya senilai Rp788.590.000,-;
- Eks Direktorat Keselamatan Transportasi Perhubungan Darat (likuidasi) berupa Monografi senilai Rp12.712.083.000,- dan Bahan Kartografi Lainnya senilai Rp1.150.000,-;
- Satker Pengembangan LLAJ D.I. Yogyakarta (satker likuidasi) berupa Aset Tetap Lainnya dalam Renovasi senilai Rp1.122.713.000,-;
- Satker Pengembangan LLASDP Aceh (satker likuidasi) berupa Aset Tetap Lainnya dalam Renovasi senilai Rp4.348.060.000,-;

- Satker Pengembangan LLASDP Sumatera Barat (satker likuidasi) berupa Aset Tetap Lainnya dalam Renovasi senilai Rp5.615.198.000,-;
- Satker Pengembangan LLASDP Riau (satker likuidasi) berupa Gedung dan Bangunan dalam Renovasi senilai Rp1.036.994.000;
- Satker Pengembangan LLAJ Kalimantan Barat (satker likuidasi) berupa Aset Tetap Lainnya dalam Renovasi senilai Rp543.973.000,-;
- Satker Pengembangan LLASDP Kalimantan Barat (satker likuidasi) berupa Aset Tetap Lainnya dalam Renovasi senilai Rp44.267.640.080,-;
- Satker Pengembangan LLASDP Sulawesi Utara (satker likuidasi) berupa Aset Tetap Lainnya dalam Renovasi senilai Rp13.643.352.000,-;
- Satker Pengembangan LLASDP Sulawesi Tenggara (satker likuidasi) berupa Aset Tetap Lainnya dalam Renovasi senilai Rp4.900.757.000,-;
- Satker Pengembangan LLAJ Maluku (satker likuidasi) berupa Aset Tetap Lainnya dalam Renovasi senilai Rp1.152.140.000,-;
- Satker Pengembangan LLASDP Maluku (satker likuidasi) berupa Aset Tetap Lainnya dalam Renovasi senilai Rp189.210.000,-;
- Satker Pengembangan LLAJ Nusa Tenggara Timur (satker likuidasi) berupa Aset Tetap Lainnya dalam Renovasi senilai Rp544.400.000,-;
- Satker Pengembangan LLASDP Nusa Tenggara Timur (satker likuidasi) berupa Aset Tetap Lainnya dalam Renovasi senilai Rp14.645.360.000,-;
- Satker Pengembangan LLAJ Papua (satker likuidasi) berupa Aset Tetap Lainnya dalam Renovasi senilai Rp345.572.500,-;

- Satker Pengembangan LLASDP Papua (satker likuidasi) berupa Aset Tetap Lainnya dalam Renovasi senilai Rp1.734.248.000,-;
- Satker Pengembangan LLAJ Bengkulu (satker likuidasi) berupa Aset Tetap Lainnya dalam Renovasi senilai Rp347.741.000,-;
- Satker Pengembangan LLAJ Kepulauan Riau (satker likuidasi) berupa Aset Tetap Lainnya dalam Renovasi senilai Rp195.286.000,- dan Buku Lainnya senilai Rp685.949.000,-;
- Satker Pengembangan LLAJ Papua Barat (satker likuidasi) berupa Aset Tetap Lainnya dalam Renovasi senilai Rp751.960.000,-;
- Satker Pengembangan LLAJ Sulawesi Barat (satker likuidasi) berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan dalam Renovasi senilai Rp692.750.000,-; Aset Tetap Lainnya dalam Renovasi senilai Rp1.629.452.000,-;
- Satker Pengembangan LLASDP Sulawesi Barat (satker likuidasi) berupa Aset Tetap Lainnya dalam Renovasi senilai Rp16.738.451.000,-.

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Konstruksi

Dalam

Pengerjaan

Rp626.682.678.920,-

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp626.682.678.920,- dan Rp384.747.414.505,- yang merupakan pembangunan gedung dan bangunan yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca. Rincian lebih lanjut dari Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan dalam lampiran.

*Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap
Rp2.145.814.632.9
13,-*

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing Rp2.145.814.632.913,- dan Rp1.667.846.123.702,-.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2016, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	Rp 493.424.519.575	Rp -	Rp 493.424.519.575
2	Peralatan dan Mesin	Rp 5.388.113.204.230	Rp 1.661.700.643.488	Rp 3.726.412.560.742
3	Gedung dan Bangunan	Rp 1.079.846.864.178	Rp 114.104.464.888	Rp 965.742.399.290
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Rp 2.837.607.055.840	Rp 369.994.524.537	Rp 2.467.612.531.303
5	Aset Tetap Lainnya	Rp 355.965.443.689	Rp 15.000.000	Rp 355.950.443.689
Jumlah		Rp 10.154.957.087.512	Rp 2.145.814.632.913	Rp 8.009.142.454.599

Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada lampiran.

*Aset Tak
Berwujud
Rp714.639.045
.561,-*

C.21 Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp714.639.045.561,- dan Rp477.782.227.441,-. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik.

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tak Berwujud TA 2016

No.	Uraian	Nilai
1.	Software	Rp 7.342.186.640
2.	Hasil Kajian/Penelitian	Rp 204.120.320.740
3.	Paten	Rp 23.167.000
4.	Lisensi	Rp 306.955.000
5.	Aset Tak Berwujud Lainnya	Rp 502.846.416.181
Jumlah		Rp 714.639.045.561

Mutasi Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2015		Rp	477.782.227.441
Mutasi Tambah :			
	Pembelian	Rp	52.280.000
	Transfer Masuk	Rp	436.342.772.171
	Reklasifikasi Masuk	Rp	239.013.941.840
	Penyelesaian Pembangunan dgn KDP	Rp	123.598.406.555
	Penyelesaian Pembangunan Langsung	Rp	181.982.900
Mutasi Kurang :			
	Penghentian aset dari penggunaan	Rp	(179.311.249.560)
	Penghapusan	Rp	(9.752.779.950)
	Transfer Keluar	Rp	(291.377.184.311)
	Reklasifikasi Keluar	Rp	(596.745.600)
	Transaksi Normalisasi BMN Aset Tetap	Rp	(81.294.605.925)
Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2016		Rp	714.639.045.561
Amortisasi s.d. 31 Desember 2016		Rp	(5.023.214.305)
Nilai Buku per 31 Desember 2016		Rp	709.615.831.256

Mutasi tambah:

a. Penambahan melalui Pembelian Aset Tak Berwujud senilai Rp52.280.000,- terdapat pada:

- Balai LLAJSDP Palu berupa Hasil Kajian/Penelitian senilai Rp48.675.000,-; dan
- Satker Perhubungan Darat Prov. Sulawesi Tenggara berupa *software* komputer Rp3.605.000,-.

b. Penambahan melalui Transfer Masuk senilai Rp436.342.772.171 terdapat pada:

- Direktorat Angkutan dan Multimoda Perhubungan Darat berupa *software* komputer senilai Rp207.908.140,-, Hasil Kajian/Penelitian senilai Rp41.454.899.600,-, dan Aset Tak Berwujud Lainnya senilai Rp160.856.529.692,-;

- Direktorat Pembinaan Keselamatan Perhubungan Darat berupa *software* komputer senilai Rp681.000.000,-;
- Direktorat Pembinaan Keselamatan Perhubungan Darat berupa *software* komputer senilai Rp544.225.000,-, Hasil Kajian/Penelitian senilai Rp1.790.006.900,-, dan Aset Tak Berwujud Lainnya senilai Rp64.565.345.680,-;
- Direktorat Sarana Perhubungan Darat berupa Hasil Kajian/Penelitian senilai Rp489.335.000,-, dan Aset Tak Berwujud Lainnya senilai Rp25.867.455.970,-;
- Direktorat Prasarana Perhubungan Darat berupa *software* komputer senilai Rp13.480.000,-, Hasil Kajian/Penelitian senilai Rp16.433.003.400,-, dan Aset Tak Berwujud Lainnya senilai Rp114.476.704.089,-;
- Balai LLAJSDP Jambi berupa Hasil Kajian/Penelitian senilai Rp1.154.555.000,-, dan Aset Tak Berwujud Lainnya senilai Rp19.800.000,-;
- Balai LLAJSDP Palangkaraya berupa Aset Tak Berwujud Lainnya senilai Rp1.438.000.000,-;
- Balai LLAJSDP Palu berupa Hasil Kajian/Penelitian senilai Rp582.549.000,- dan Aset Tak Berwujud Lainnya senilai Rp2.265.509.000,-; dan
- Balai LLAJSDP Denpasar berupa Hasil Kajian/Penelitian senilai Rp657.402.500,- dan Aset Tak Berwujud senilai Rp2.845.063.200,-.

c. Penambahan melalui Reklasifikasi Masuk senilai Rp239.013.941.840 terdapat pada:

- Direktorat Angkutan dan Multimoda Perhubungan Darat berupa *software* komputer senilai Rp64.158.140,-, Hasil Kajian/Penelitian senilai Rp55.653.584.600,-, dan Aset Tak Berwujud Lainnya senilai Rp128.345.228.900,-;
- Direktorat Pembinaan Keselamatan Perhubungan Darat berupa *software* komputer senilai Rp681.000.000,-;
- Direktorat Lalu Lintas Perhubungan Darat berupa *software* komputer senilai Rp13.480.000,-, Hasil

Kajian/Penelitian senilai Rp1.573.869.000,-, dan Aset Tak Berwujud Lainnya senilai Rp34.569.562.000,-;

- Direktorat Sarana Perhubungan Darat berupa Hasil Kajian/Penelitian senilai Rp3.845.922.300,- dan Aset Tak Berwujud Lainnya senilai Rp8.827.041.100,-;
- Direktorat Prasarana Perhubungan Darat berupa Aset Tak Berwujud Lainnya senilai Rp2.961.320.800,-; dan
- Balai LLAJSDP Palu berupa Aset Tak Berwujud Lainnya senilai Rp2.478.775.000,-.

d. Penambahan melalui Penyelesaian Pembangunan dengan KDP senilai Rp123.598.406.555,- terdapat pada:

- Sekretariat Jendral Perhubungan Darat berupa Hasil Kajian/Penelitian senilai Rp13.396.400.000,-;
- Direktorat Angkutan dan Multimoda Perhubungan Darat berupa Lisensi senilai Rp306.955.000,- dan Hasil Kajian/Penelitian senilai Rp11.023.276.140,-;
- Direktorat Pembinaan Keselamatan Perhubungan Darat berupa Aset Tak Berwujud Lainnya senilai Rp13.047.122.500,-;
- Direktorat Lalu Lintas Perhubungan Darat berupa Hasil Kajian/Penelitian senilai Rp2.656.464.800,- dan Aset Tak Berwujud Lainnya senilai Rp17.692.367.825,-;
- Direktorat Sarana Perhubungan Darat berupa Hasil Kajian/Penelitian senilai Rp5.359.667.940,- dan Aset Tak Berwujud Lainnya senilai Rp2.264.814.700,-;
- Direktorat Prasarana Perhubungan Darat berupa Aset Tak Berwujud senilai Rp45.162.066.750,-;
- Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Pagimana berupa Hasil Kajian/Penelitian senilai Rp3.331.027.250,-;
- Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk berupa Hasil Kajian/Penelitian senilai Rp1.656.713.850,-;
- Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Lembar berupa Hasil Kajian/Penelitian senilai Rp2.144.205.800,-;

- Unit Pelaksana Teknis Kalabahi berupa Aset Tak Berwujud Lainnya senilai Rp1.202.300.000,-; dan
- Otoritas Pelabuhan penyeberangan Merak berupa Aset Tak Berwujud Lainnya senilai Rp4.355.024.000,-.

e. Penambahan melalui Penyelesaian Pembangunan Langsung senilai Rp181.982.900 terdapat pada Balai LLAJSDP Denpasar berupa Hasil Kajian/Penelitian senilai Rp181.982.900.

f. Transaksi Normalisasi BMN Aset Tetap terdapat pada:

- Direktorat Angkutan dan Multimoda Perhubungan Darat berupa Aset Tak Berwujud Lainnya senilai Rp7.897.869.500,-; dan
- Direktorat Sarana Perhubungan Darat berupa Aset Tak Berwujud Lainnya senilai Rp17.622.156.270,-.

Mutasi kurang:

a. Penghentian Aset dari Penggunaan senilai Rp179.311.249.560,- terdapat pada:

- Direktorat Angkutan dan Multimoda Perhubungan Darat berupa *software* komputer senilai Rp207.908.140,-, Hasil Kajian/Penelitian senilai Rp17.342.514.700,-, dan Aset Tak Berwujud Lainnya senilai Rp83.124.330.150,-;
- Direktorat Lalu Lintas Perhubungan Darat berupa *software* komputer senilai Rp557.705.000,-, Hasil Kajian/Penelitian senilai Rp1.612.132.500,-, dan Aset Tak Berwujud Lainnya senilai Rp20.141.983.500,-;
- Direktorat Sarana Perhubungan Darat berupa Aset Tak Berwujud Lainnya senilai Rp22.617.270.970,-; dan
- Direktorat Prasarana Perhubungan Darat berupa *software* komputer senilai Rp13.480.000,-, Hasil Kajian/Penelitian senilai Rp3.153.051.000,-, dan Aset Tak Berwujud Lainnya senilai Rp30.540.873.600,-.

b. Penghapusan pada Aset Tak Berwujud senilai Rp9.752.779.950 terdapat pada Direktorat Angkutan dan Multimoda Perhubungan Darat berupa Aset Tak Berwujud Lainnya senilai Rp9.752.779.950.

c. Transfer Keluar dari Aset Tak Berwujud senilai Rp291.377.184.311,- terdapat pada:

- Direktorat Lalu Lintas Perhubungan Darat berupa Hasil Kajian/Penelitian senilai Rp1.570.142.200,- dan Aset Tak Berwujud Lainnya senilai Rp41.457.764.397,-;
- Pengembangan Transportasi SDP (satker Likuidasi) berupa Hasil Kajian/Penelitian berupa Hasil Kajian/Penelitian senilai Rp11.889.870.300,- dan Aset Tak Berwujud Lainnya senilai Rp1.633.274.500,-;
- Direktorat Sarana Perhubungan Darat berupa *software* komputer senilai Rp681.000.000,-, Hasil Kajian/Penelitian senilai Rp6.549.720.100,-, dan Aset Tak Berwujud Lainnya senilai Rp54.250.643.250,-;
- Direktorat Prasarana Perhubungan Darat berupa hasil Kajian/Penelitian senilai Rp23.469.605.400,- dan Aset Tak Berwujud Lainnya senilai Rp138.433.510.464,-;
- Satker Pengembangan LLAJ Jawa Tengah (satker Likuidasi) berupa Aset Tak Berwujud Lainnya senilai Rp328.936.000,-;
- Satker Pengembangan LLAJ D. I. Yogyakarta (satker Likuidasi) berupa Hasil Kajian/Penelitian senilai Rp657.402.500,-;
- Satker Pengembangan LLASDP Kalimantan Timur (satker Likuidasi) berupa Aset Tak Berwujud Lainnya senilai Rp1.438.000.000,-;
- Satker Pengembangan LLASDP Sulawesi Utara (satker Likuidasi) berupa Aset Tak Berwujud Lainnya senilai Rp374.350.000,-;
- Satker Pengembangan LLAJ Nusa Tenggara Timur (satker Likuidasi) berupa Aset Tak Berwujud Lainnya senilai Rp329.215.400,-;
- Satker Pengembangan LLASDP Nusa Tenggara Timur (satker Likuidasi) berupa Aset Tak Berwujud Lainnya senilai Rp2.186.911.800,-;

- Satker Pengembangan LLASDP Papua (satker Likuidasi) berupa Hasil Kajian/Penelitian senilai Rp582.549.000,-;
- Satker Pengembangan LLASDP Bengkulu (satker Likuidasi) berupa Hasil Kajian/Penelitian senilai Rp1.154.555.000,-;
- Satker Pengembangan LLASDP Maluku Utara (satker Likuidasi) berupa Aset Tak Berwujud Lainnya senilai Rp2.478.775.000,-;
- Satker Pengembangan LLASDP Kepulauan Riau (satker Likuidasi) berupa Aset Tak Berwujud Lainnya senilai Rp19.800.000,-;
- Satker Pengembangan LLAJ Papua Barat (satker Likuidasi) berupa Aset Tak Berwujud Lainnya senilai Rp161.084.000,-;
- Satker Pengembangan LLAJ Sulawesi Barat (satker Likuidasi) berupa Aset Tak Berwujud Lainnya senilai Rp496.700.000,-; dan
- Satker Pengembangan LLASDP Sulawesi Barat (satker Likuidasi) berupa Aset Tak Berwujud Lainnya senilai Rp1.233.375.000,-.

d. Reklasifikasi Keluar Aset Tak Berwujud senilai Rp596.745.600,- terdapat pada Direktorat Lalu Lintas Perhubungan Darat berupa Aset Tak Berwujud Lainnya senilai Rp596.745.600,-.

e. Transaksi Normalisasi BMN Aset Tetap senilai Rp81.294.605.925 terdapat pada:

- Direktorat Lalu Lintas Perhubungan Darat berupa Hasil Kajian/Penelitian senilai Rp1.387.504.800,- dan Aset Tak Berwujud Lainnya senilai Rp55.888.984.705,-;
- Direktorat Prasarana Perhubungan Darat berupa Aset Tak Berwujud Lainnya senilai Rp44.178.474.250,-; dan
- Direktorat Sarana Perhubungan Darat berupa Hasil Kajian/Penelitian senilai Rp5.359.667.940,-.

Rincian aset tak berwujud disajikan pada lampiran.

Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan
Rp3.414.609.760.870,-

C.22 Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan

Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan merupakan Aset Tak Berwujud yang perolehan atau penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Saldo Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah Rp559.920.000,- dan Rp0,-.

Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan terdapat pada Balai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan Jambi sebesar Rp559.920.000,- dengan Nomor Kontrak 01/KONTRAK/DED/BLLAJSD.

Aset Lain-Lain
Rp3.414.609.760.870,-

C.23 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah Rp3.414.609.760.870,- dan Rp3.196.586.476.490,-. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Direktorat Jenderal Perhubungan Darat serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Aset lain-lain terdiri dari Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah dengan saldo sebesar Rp3.207.967.152.380,- dan Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam operasional dengan saldo sebesar Rp206.642.608.490,-.

Rincian Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah T.A. 2016

No.	Uraian	Nilai
1.	Barang Rusak (siap untuk dihapuskan)	Rp 327.705.045.085
2.	Persediaan yang akan diserahkan kepada masyarakat	Rp 1.645.091.598.550
3.	Aset Tetap yang sudah diusulkan status hibah kepada Kementerian Keuangan	Rp 1.161.808.314.668
4.	Aset Tetap yang akan dilakukan proses penghapusan	Rp 73.362.194.077
Jumlah		Rp 3.207.967.152.380,00

Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2015	Rp	3.196.586.476.490
Mutasi Tambah :		
Reklasifikasi Masuk dari Aset Tetap	Rp	3.185.668.570.661
Transfer Masuk	Rp	-
Mutasi Kurang :		
Penghapusan BMN	Rp	(370.305.400)
Transfer Keluar (BMN yang dihentikan)	Rp	(2.921.765.219.911)
Reklasifikasi Keluar	Rp	-
Penggunaan Kembali BMN yang dihentikan	Rp	-
Transaksi Normalisasi BMN (BMN yg dihentikan)	Rp	(45.509.760.970)
Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2016	Rp	3.414.609.760.870
Amortisasi s.d. 31 Desember 2016	Rp	(521.503.556.036)
Nilai Buku per 31 Desember 2016	Rp	2.893.106.204.834

Mutasi tambah berasal dari:

a. Penambahan yang berasal dari reklasifikasi aset tetap yang dihentikan dari penggunaannya sebesar Rp3.185.668.570.661,- terdapat pada:

- Satker Direktorat Angkutan dan Multimoda Perhubungan Darat senilai Rp538.196.429.325,-;
- Satker Direktorat Lalu Lintas Perhubungan Darat senilai Rp44.699.061.450,-;
- Satker Direktorat Sarana Perhubungan Darat senilai Rp78.614.803.450,-;
- Satker Direktorat Prasarana Perhubungan Darat senilai Rp47.518.998.288,-;
- Balai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan Jambi senilai Rp515.834.390.263,-
- Satker Perhubungan Darat Provinsi Kalimantan Timur senilai Rp76.068.291.250,-;
- Balai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan Palu senilai Rp1.093.193.827.296,-
- Balai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan Denpasar senilai Rp426.689.622.188,-;

- Balai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan Palangkaraya senilai Rp319.119.472.151,-.

Mutasi kurang berasal dari:

a. Pengurangan yang berasal dari penghapusan BMN sebesar Rp370.305.400 pada Satker Sekretariat Jenderal Perhubungan Darat, dengan rincian:

Uraian	Nilai
Penghapusan (BMN yang dihentikan) - SCANNER	Rp15.750.000
Penghapusan (BMN yang dihentikan) - Mesin Ketik Manual	Rp4.133.000
Penghapusan (BMN yang dihentikan) - Mesin Ketik Elektronik	Rp9.750.000
Penghapusan (BMN yang dihentikan) - Lemari Besi	Rp5.939.000
Penghapusan (BMN yang dihentikan) - Filing Cabinet Besi	Rp6.191.000
Penghapusan (BMN yang dihentikan) - Penghancur Kertas	Rp4.185.000
Penghapusan (BMN yang dihentikan) - Buffet	Rp1.968.000
Penghapusan (BMN yang dihentikan) - Meja Kerja Kayu	Rp1.278.000
Penghapusan (BMN yang dihentikan) - Kursi Besi/Metal	Rp4.125.000
Penghapusan (BMN yang dihentikan) - Pesawat Telepon	Rp176.000
Penghapusan (BMN yang dihentikan) - PC Unit	Rp193.867.000
Penghapusan (BMN yang dihentikan) - Note Book	Rp99.476.400
Penghapusan (BMN yang dihentikan) – HUB	Rp13.775.000
Penghapusan (BMN yang dihentikan) - Printer	Rp9.692.000
Jumlah	Rp370.305.400

b. Pengurangan yang berasal dari Transfer Keluar (BMN yang Dihentikan) sebesar Rp2.921.765.219.911 terdapat pada:

- Satker Direktorat Lalu Lintas Perhubungan Darat senilai Rp221.420.698.835,- dengan rincian Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Kegiatan Operasional senilai Rp203.776.676.335,- dan Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Kegiatan Operasional senilai Rp17.644.022.500,-;

- Satker Direktorat Sarana Perhubungan Darat senilai Rp136.849.311.810,- dengan rincian Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Kegiatan Operasional senilai Rp22.364.690.450,- dan Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Kegiatan Operasional senilai Rp114.484.621.360,-;
- Satker Direktorat Prasarana Perhubungan Darat senilai Rp108.609.139.948,- dengan rincian Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Kegiatan Operasional senilai Rp59.217.489.248,- dan Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Kegiatan Operasional senilai Rp49.391.650.700,-;
- Balai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan Palu senilai Rp1.537.444.000,- berupa Transfer Keluar (BMN yang Dihentikan) berupa Alat Penguji Kendaraan Bermotor Lainnya.
- Transfer Keluar (BMN yang dihentikan) yang berasal dari Satker sebelum likuidasi senilai Rp2.453.348.625.318,-

Kode Satker	Nama Satker Sebelum Likuidasi	Nilai
445526	PENGEMBANGAN TRANSPORTASI SDP	1.687.879.420
466740	PENGEMBANGAN LLAJ JATENG	4.837.188.190
466731	PENGEMBANGAN LLAJ DIY	29.094.113.440
467164	PENGEMBANGAN LLASDP KALTIM	166.037.178.511
466957	PENGEMBANGAN LLASDP SULBAR	10.101.936.000
466787	PENGEMBANGAN LLAJ NTT	21.545.922.000
467111	PENGEMBANGAN LLASDP NTT	98.003.753.000
467277	PENGEMBANGAN LLASDP PAPUA	149.090.591.353
467246	PENGEMBANGAN LLASDP MALUT	232.437.936.850
467051	PENGEMBANGAN LLASDP BENGKULU	43.970.896.000
467170	PENGEMBANGAN LLASDP SULUT	140.091.849.577
466881	PENGEMBANGAN LLAJ SULAWESI BARAT	4.414.486.129
467060	PENGEMBANGAN LLASDP JATENG	221.427.789.500
467076	PENGEMBANGAN LLASDP DIY	4.061.560.800
466756	PENGEMBANGAN LLAJ JATIM	821.700.000
467082	PENGEMBANGAN LLASDP JATIM	111.554.460.258
466612	PENGEMBANGAN LLAJ ACEH	56.279.196.665
466968	PENGEMBANGAN LLASDP ACEH	16.993.186.292
466621	PENGEMBANGAN LLAJ SUMUT	198.512.000

466972	PENGEMBANGAN LLASDP SUMUT	146.316.577.938
466652	PENGEMBANGAN LLAJ SUMBAR	5.453.601.250
466988	PENGEMBANGAN LLASDP SUMBAR	41.076.461.713
466637	PENGEMBANGAN LLAJ RIAU	11.526.234.392
466994	PENGEMBANGAN LLASDP RIAU	123.934.839.000
466700	PENGEMBANGAN LLAJ LAMPUNG	4.640.007.000
467597	PENGEMBANGAN LLASDP LAMPUNG	28.706.881.000
466793	PENGEMBANGAN LLAJ KALBAR	3.441.479.000
467133	PENGEMBANGAN LLASDP KALBAR	57.627.772.000
467158	PENGEMBANGAN LLASDP KALSEL	43.386.182.000
466822	PENGEMBANGAN LLAJ KALTIM	48.983.985.640
466844	PENGEMBANGAN LLAJ SULUT	35.414.747.900
466875	PENGEMBANGAN LLAJ SULSEL	2.602.196.000
467215	PENGEMBANGAN LLASDP SULSEL	55.932.813.000
466869	PENGEMBANGAN LLAJ SULTENG	1.688.500.000
447548	PENGEMBANGAN SARANA SDP MALUKU	65.024.903.550
466901	PENGEMBANGAN LLAJ MALUKU	15.558.338.000
467252	PENGEMBANGAN LLASDP MALUKU	158.764.152.000
466910	PENGEMBANGAN LLAJ PAPUA	9.489.518.500
466699	PENGEMBANGAN LLAJ BENGKULU	1.663.233.000
466890	UAPKPB MALUT	773.900.000
467020	PENGEMBANGAN LLASDP BABEL	480.089.000
466838	PENGEMBANGAN LLAJ GORONTALO	1.697.497.000
467008	PENGEMBANGAN LLASDP KEPRI	67.941.563.013
467261	PENGEMBANGAN LLASDP PAPUA BARAT	208.573.017.437
Jumlah		2.453.348.625.318

c. Pengurangan yang berasal dari Transaksi Normalisasi BMN (BMN yang Dihentikan) sebesar Rp45.509.760.970 terdapat pada:

- Satker Direktorat Angkutan dan Multimoda Perhubungan Darat sebesar Rp8.835.569.500,-
- Satker Direktorat Lalu Lintas Perhubungan Darat sebesar Rp11.916.788.000,- dengan rincian Transaksi Normalisasi BMN Hasil Kajian/Penelitian dan Aset Tak Berwujud Lainnya sebesar Rp775.087.500,- dan 11.141.700.500,-.
- Satker Direktorat Sarana Perhubungan Darat sebesar Rp22.617.270.970,- berupa Transaksi Normalisasi BMN (BMN yang Dihentikan) pada Aset Tak Berwujud Lainnya.

- Satker Direktorat Prasarana Perhubungan Darat sebesar Rp2.140.132.500,- berupa Transaksi Normalisasi BMN (BMN yang Dihentikan) pada Aset Tak Berwujud Lainnya.

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada lampiran.

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Rp526.526.770.341,-

C.24 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp526.526.770.341,- dan Rp55.219.356.229,-. Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

No.	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
A.	Aset Tak Berwujud	Rp 714.639.045.561	Rp 5.023.214.305	Rp 709.615.831.256
B.	Aset Lainnya	Rp 3.414.609.760.870	Rp 521.503.556.036	Rp 2.893.106.204.834
	Total	Rp 4.129.248.806.431	Rp 526.526.770.341	Rp 3.602.722.036.090

Uang Muka dari KPPN Rp3.281.206,-

C.25 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp3.281.206,- dan Rp34.956.823,-. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang kepada Pihak Ketiga Rp3.153.553.519,-

C.26 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp3.153.553.519,- dan Rp7.090.963.805,-. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan akan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang

dari 12 (dua belas bulan). Pada Deputi Administrasi, Utang kepada Pihak Ketiga terdiri dari honor kegiatan yang belum dibagikan kepada pegawai, dan kekurangan gaji pegawai yang belum dibayar.

Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada lingkup per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Saldo Utang kepada Pihak Ketiga

No.	Uraian	Jumlah
1.	Utang Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	Rp 900.000
2.	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	Rp 2.980.816.517
3.	Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	Rp 158.418.000
4.	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	Rp 13.419.002
Total		Rp 3.153.553.519

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga adalah sebagai berikut:

- a. Saldo Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar terdapat pada Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor Bekasi senilai Rp900.000;
- b. Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar terdapat pada :
 - Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor Bekasi senilai Rp15.002.540;
 - Satker Perhubungan Darat Prov. Kalimantan Barat senilai Rp2.567.572.650;
 - Satker Perhubungan Darat Prov. Maluku Utara senilai Rp146.552.000;
 - Direktorat Lalu Lintas Perhubungan Darat senilai Rp232.375.000; dan
 - Pelabuhan Penyeberangan Kariangu senilai Rp19.314.327.
- c. Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar terdapat pada Direktorat Lalu Lintas Perhubungan Darat senilai Rp158.418.000; dan
- d. Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya terdapat pada Satker Perhubungan Darat Prov. Papua Barat senilai Rp13.419.002.

<i>Pendapatan Diterima di Muka Rp0,-</i>	C.27 Pendapatan Diterima di Muka	Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2016 dan 2015 sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBP.
<i>Beban yang Masih harus Dibayar Rp0,-</i>	C.28 Beban yang Masih Harus Dibayar	Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2016 dan 2015 sebesar Rp0,- dan Rp0,-, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya.
<i>Ekuitas Rp15.646.897.803.994,-</i>	C.29 Ekuitas	Ekuitas per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp15.646.897.803.994,- dan Rp15.329.083.953.901,-. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan

PNBP

Rp148.534.059.9

26,-

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar Rp148.534.059.926,- dan Rp40.334.351.049,-. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan Rincian Pendapatan PNBP TA 2016 dan TA 2015

URAIAN	TH 2016	TH 2015	% Naik (TURUN)
Pendapatan PNBP Lainnya			
Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan			
Pendapatan Penjualan Lainnya	400.000	-	-
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	18.081.640	-	-
Jumlah Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan	18.481.640	-	-
Pendapatan Jasa			
Pendapatan Hak Dan Perijinan	9.574.245.001	4.636.250.000	107
Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan	134.258.525.000	16.412.457.000	718
Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhanan, dan Kenavigasi	2.948.947.226	2.737.704.832	8
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	79.817	-	-
Jumlah Pendapatan Jasa	146.781.797.044	23.786.411.832	
Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi			
Pendapatan Hasil Pengembalian Uang Negara	41.690.400	-	-
Jumlah Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi	41.690.400	-	-
Pendapatan Denda			
Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan	1.692.090.487	11.965.543.678	(86)
Jumlah Pendapatan Denda	1.692.090.487	11.965.543.678	
Pendapatan Lain-Lain			
Pendapatan Anggaran Lain-Lain	355	4.582.395.539	(100)
Jumlah Pendapatan Lain-Lain	355	4.582.395.539	
Jumlah	148.534.059.926	40.334.351.049	

Beban Pegawai

Rp77.186.642.100,

-

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2016 dan Tahun 2015 adalah masing-masing sebesar Rp77.186.642.100,- dan Rp77.200.599.432,-. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Rincian Beban Pegawai TA 2016 dan TA 2015

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2016	TH 2015	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji Pokok PNS	36.941.150.959,	32.127.349.220	15
Pengembalian Beban Gaji Pokok PNS	-298.600,	(2.702.400)	-
Beban Pembulatan Gaji PNS	536.268,	598.493	(10)
Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	-8.664,	(87.369)	-
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	2.334.689.772,	2.199.742.342	6
Beban Tunj. Anak PNS	649.683.603,	601.818.828	8
Beban Tunj. Struktural PNS	1.425.310.000,	1.348.690.000	6
Beban Tunj. Fungsional PNS	221.175.000,	288.530.000	(23)
Beban Tunj. PPh PNS	332.281.231,	617.966.379	(46)
Beban Tunj. Beras PNS	1.969.378.840,	1.836.374.780	7
Beban Uang Makan PNS	5.021.006.000,	4.903.114.200	2
Beban Tunj. Lain-lain Termasuk Uang Duka PNS Dalam dan Luar Negeri	10.946.700,	21.720.900	(50)
Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	-3.590.000,	(1.480.000)	-
Beban Tunjangan Umum PNS	1.719.910.000,	1.618.440.000	6
Beban Uang Lembur	1.782.246.000,	775.561.000	130
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	14.968.224.890,	31.909.488.399	(53)
Pengembalian Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	-761.339.729,	(1.044.251.740)	-
Pengembalian Beban Uang Makan PNS	-	(273.600)	-
Beban Pegawai Transito	10.575.339.830,	-	-
Jumlah	77.186.642.100,	77.200.599.432	

Beban

Persediaan

Rp4.407.007.442

,-

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2016 dan Tahun 2015 adalah masing-masing sebesar Rp4.407.007.442,- dan Rp3.778.714.865,-.

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Beban Persediaan TA 2016 dan TA 2015

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2016	TH 2015	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan konsumsi	4.254.900.715,	3.636.654.940	17
Beban Persediaan pita cukai, materai dan leges	15.114.620,	285.000	5.203
Beban Persediaan bahan baku	125.461.107,	119.620.925	5
Beban Persediaan Lainnya	11.531.000,	22.154.000	(48)
Jumlah	4.407.007.442,	3.778.714.865	

Beban Barang dan Jasa **D.4 Beban Barang dan Jasa**

dan Jasa Beban Barang dan jasa Tahun 2016 dan Tahun 2015 adalah *Rp704.356.283.125,-* masing-masing sebesar *Rp704.356.283.125,-* dan *Rp661.746.098.678,-*.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2016 dan TA 2015

URAIAN	TH 2016	TH 2015	% Naik (TURUN)
Beban Keperluan Perkantoran	13.310.061.809	7.860.098.446	69
Beban Pengadaan Bahan Makanan	883.075.000	1.126.314.000	(22)
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	480.885.700	55.980.000	759
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	116.699.851	69.314.580	68
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	9.686.509.362	10.879.108.125	(11)
Pengembalian Beban Honor Operasional Satuan Kerja	(22.410.000)	(17.220.000)	-
Beban Barang Operasional Lainnya	398.432.061.223	453.768.735.303	(12)
Pengembalian Beban Barang Operasional Lainnya	0	(1.146.000)	0
Beban Bahan	5.401.990.517	5.471.635.520	(1)
Beban Honor Output Kegiatan	13.535.834.695	11.423.095.100	18
Pengembalian Beban Honor Output Kegiatan	(38.666.000)	-	0
Beban Barang Non Operasional Lainnya	219.945.403.487	149.525.612.698	47
Pengembalian Beban Barang Non Operasional Lainnya	0	(294.030.803)	-
Beban Langganan Listrik	1.942.437.060	1.700.359.568	14
Beban Langganan Telepon	537.730.152	632.264.365	(15)
Beban Langganan Air	196.449.177	174.857.240	12
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	1.093.296.615	123.720.195	784
Beban Sewa	30.082.432.557	14.607.143.389	106
Beban Jasa Profesi	3.112.850.000	2.166.180.650	44
Beban Jasa Lainnya	4.161.641.245	1.855.360.220	124
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	1.089.763.175	618.716.082	-
Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tak Berwujud	408.237.500	-	-
Jumlah	704.356.283.125	661.746.098.678	6

Beban

Pemeliharaan

Rp60.322.151.630,-

0,-

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp60.322.151.630,- dan Rp39.071.890.685,-. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan TA 2016 dan TA 2015

Uraian	TH 2016	TH 2015	% Naik (TURUN)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	8.627.501.095	6.135.868.989	41
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	185.579.766	0	-
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	31.170.430.888	23.524.673.386	33
Pengembalian Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	(11.033.827)	(3.860.000)	186
Beban Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus	129.680.842	48.026.986	170
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	891.926.695	958.415.628	(7)
Pengembalian Beban Pemeliharaan Lainnya	(538.840.837)	0	-
Beban Pemeliharaan Lainnya	19.463.728.400	8.374.875.900	132
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	66.652.982	30.951.896	115
Beban Persediaan suku cadang	336.525.626	2.937.900	11.355
Jumlah	60.322.151.630	39.071.890.685	

Beban

Perjalanan

Dinas

Rp102.642.889.0

41,-

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp102.642.889.041,- dan Rp68.764.054.700,-.

Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Rincian Beban perjalanan Dinas untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2016 dan 2015

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2016	TH 2015	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	86.284.303.419	58.505.999.545	47
Pengembalian Beban Perjalanan Biasa	(1.389.491.021)	(383.078.335)	263
Beban Perjalanan Tetap	240.809.175	408.453.000	(41)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	156.865.000	0
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	(1.500.000)	0	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.412.183.244	1.155.809.550	22
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	(600.000)	0	0
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	(17.681.600)	0	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	12.832.768.870	7.868.281.874	63
Pengembalian Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	(36.673.800)	0	0
Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	1.900.388.704	1.024.007.266	86
Beban Perjalanan Lainnya Luar Negeri	0	27.716.800	0
Jumlah	102.642.889.041	68.764.054.700	

*Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat
Rp0,-*

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini, Deputy Administrasi BAPK bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2015.

Beban Bantuan Sosial Rp0,- **D.8 Beban Bantuan Sosial**

Beban Bantuan Sosial Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang sifatnya tidak terus-menerus dan selektif.

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp393.511.118.490,- **D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp393.511.118.490,- dan Rp674.470.146.860,-. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2016 dan TA 2015

Uraian	TH 2016	TH 2015	% Naik (TURUN)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	261.646.697.358,	521.269.047.959	(50)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	16.601.157.237,	21.857.441.801	(24)
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	22.719.745.062,	24.013.204.072	(5)
Beban Penyusutan Irigasi	52.654.690.772,	85.373.394.489	(38)
Beban Penyusutan Jaringan	174.041.202,	320.623.776	(46)
Beban Amortisasi Paten	2.432.535,	-	-
Beban Amortisasi Software	1.448.619.957,	-	-
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	119.450.000	-
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	38.263.734.367,	21.516.984.763	-
Jumlah	393.511.118.490	674.470.146.860	

Beban

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Penyisihan
Piutang Tak
terttagih Rp0,-

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp342.438.123
.051,-

D.11 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional TA 2016 dan TA 2015

URAIAN	TH 2016	TH 2015	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	65,400,000	0	0.00
Beban Penjualan Aset Non Lancar	(34,168,189,380)	(61,274,004,940)	-44.24
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional lainnya	259,164,862,050	76,451,256,878	238.99
Beban dari Kegiatan Non Operasional lainnya	(567,500,195,721)	-	
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	(342,438,123,051)	(61,274,004,940)	458.86

Pos-Pos Luar
Biasa Rp0,-

D.12 POS-POS LUAR BIASA

Pos Defisit dari Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp15.329.083.953.901,-

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp15.329.083.953.901,- dan Rp12.355.278.619.729,-.

Defisit LO

Rp1.536.330.154.953,-

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar Rp1.536.330.154.953,- dan Rp1.469.519.899.233,-. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Dampak Kumulatif

Perubahan Kebijakan

Akuntansi/

Kesalahan Mendasar

Rp0,-

E.3.1 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan

Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 sebesar Rp0,-.

Penyesuaian Nilai

Aset Rp0,-

E.3.2 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar Rp0,- dan Rp(3.998.328.986.967),-. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai

Persediaan

Rp3.497.133.000,-

E.3.3 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp3.497.133.000,- dan Rp(296.006.376.886),-. Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun

2016 antara lain koreksi atas Tanah Bangunan untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat pada Satker Inaktif LLAJ Bengkulu.

Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp0,-

E.3.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Rp1.943.201.660.619,-

E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar Rp1.943.201.660.619,- dan Rp3.607.459.564.738,-. Koreksi ini berasal dari transaksi Koreksi Aset Tetap sebesar Rp 1.896.234.368.987,- dan Koreksi Aset Lainnya sebesar Rp 46.967.291.632,- yang bukan karena revaluasi nilai.

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2016

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi	
	Debit	Kredit
Tanah	Rp -	Rp 1.676.387.345
Peralatan dan Mesin	Rp -	Rp 1.024.572.447.682
Peralatan dan Mesin yang Belum Diregister	Rp -	Rp 105.073.416
Gedung dan Bangunan	Rp -	Rp 79.375.658.757
Jalan dan Jembatan	Rp -	Rp 216.076.424.166
Irigasi	Rp -	Rp 509.802.772.699
Aset Tetap Renovasi	Rp -	Rp 604.930.800
Set Tetap Lainnya	Rp -	Rp (99.550.000)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp -	Rp 46.140.367.999
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp (87.938.829.135)	Rp -
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp (9.577.977.986)	Rp -
Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	Rp 40.481.517.741	Rp -
Akumulasi Penyusutan Irigasi	Rp 71.986.218.230	Rp -
Akumulasi Penyusutan Jaringan	Rp (473.819.286)	Rp -
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	Rp 71.874.800	Rp -
Hasil Kajian/Penelitian	Rp -	Rp 61.073.375.900
Akumulasi Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan	Rp 29.594.309.312	Rp -
Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	Rp -	Rp 1.049.773.899
	Rp 44.143.293.676	Rp 1.940.377.662.663
JUMLAH	Rp	1.896.234.368.987

Rincian Koreksi Aset Lainnya Non Revaluasi Tahun 2016

Jenis Aset Lainnya	Nilai Koreksi	
	Debit	Kredit
Software	Rp -	Rp 758.638.140
Hasil Kajian/Penelitian	Rp -	Rp (6.747.172.740)
Aset Tak Berwujud Lainnya	Rp -	Rp 102.037.749.015
Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan	Rp -	Rp (45.509.760.970)
Akumulasi Amortisasi Paten	Rp 10.425.150	Rp -
Akumulasi Penyusutan Amortisasi Software	Rp 2.877.746.738	Rp -
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan	Rp 683.989.925	Rp -
	Rp 3.572.161.813	Rp 50.539.453.445
JUMLAH	Rp	46.967.291.632

Koreksi Lainnya
Rp(334.706.213.530),-

E.3.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar Rp(334.706.213.530),- dan Rp1.970.999.828.756,-. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

Rincian Koreksi Lainnya

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Koreksi Aset	(334.722.401.130)
Koreksi Piutang	16.187.600
Jumlah	(334.706.213.530)

Transaksi Antar
Entitas
Rp242.151.424.957,-

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp242.151.424.957,- dan Rp3.159.201.203.764,-. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal K/L, antar K/L, antar BUN maupun K/L dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(244.159.951.913)
Ditagihkan ke Entitas Lain	2.836.894.157.566
Transfer Masuk	10.355.733.264.505
Transfer Keluar	(12.706.316.045.201)
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	242.151.424.957

Diterima dari Entitas
Lain (DDEL)
Rp244.159.951.913,-

Ditagihkan ke Entitas
Lain (DKEL)
Rp2.836.894.157.566,-

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada K/L yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31

Desember 2016, DDEL sebesar Rp244.159.951.913,- sedangkan DKEL sebesar Rp2.836.894.157.566,-.

Transfer Masuk

Rp10.355.733.264.505,-

Transfer Keluar

Rp 12.706.316.045.201,-

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar K/L dan antara K/L dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp10.355.733.264.505,-. Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp 12.706.316.045.201,-.

Rincian Transfer Masuk dan Transfer Keluar akan dijelaskan lebih lanjut pada lampiran.

Pengesahan Hibah

Langsung dan

Pengembalian

Pengesahan Hibah

Langsung Rp0,-

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp0,-.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 adalah Rp0,-.

Ekuitas Akhir

Rp15.646.897.803.994

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp15.646.897.803.994,- dan Rp15.329.083.953.901,-.

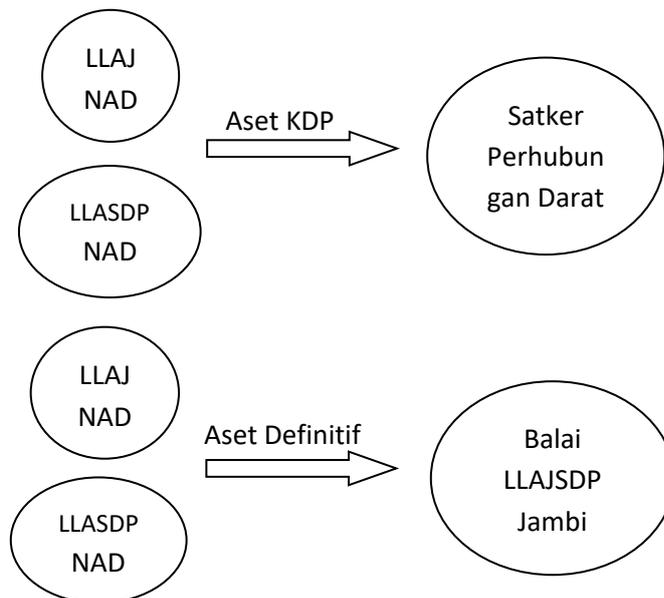
F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 Perubahan Struktur Organisasi

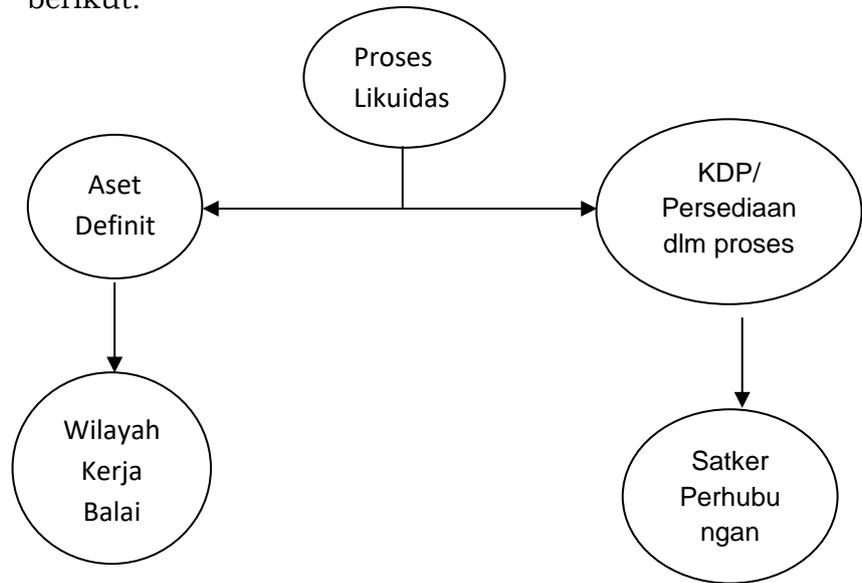
Tahun 2016 terjadi perubahan struktur organisasi sehingga terdapat beberapa satker sementara di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang dilikuidasi. Proses Likuidasi dilaksanakan sesuai dengan PMK Nomor 272/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan pada Kementerian Negara/Lembaga dan Surat Sekretaris Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor PL.201/1/18/DJPD/2016 tanggal 18 Agustus 2016 perihal Revisi Serah Terima Kegiatan dan Pemmudahbukan Pencatatan BMN.

Proses Likuidasi di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

a. Satker daerah yang dilukidasi



- b. Proses likuidasi secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:



F.2 REALISASI BELANJA TANPA PAGU PADA SATKER PERHUBUNGAN DARAT PROVINSI ACEH (401692)

Web E-Rekon tidak dapat merekam revisi rekon ulang, ADK aplikasi sudah diperbaiki dan sudah tidak ada realisasi tanpa pagu. Secara sistem web e-rekon masih terekam sebesar Rp573.900.000,-.

F.3 PENGALIHAN PERSONIL PERALATAN PENDANAAN DAN DOKUMEN (P3D)

Berdasarkan hasil rapat tanggal 15 Desember 2016 tentang Pencatatan Aset Terminal Tipe A dan UPPKB ke dalam Aset Ditjen Perhubungan Darat, berikut langkah-langkah yang telah disetujui oleh pihak-pihak terkait (SetDirektorat Jenderal Perhubungan Darat, Kabag Keuangan SetDirektorat Jenderal Perhubungan Darat, Direktorat BMN DJKN Kemenkeu, Inspektorat Jenderal Kemenhub, Biro Keuangan dan Perlengkapan Kemenhub, Direktorat Prasarana), Pencatatan Aset Pengalihan Terminal Tipe A dan UPPKB :

- A. Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (PP.71 tahun 2010) Pencatatan Aset dilakukan apabila terjadi perpindahan hak kepemilikan yang didasarkan pada

Berita Acara Serah Terima. Sesuai dengan PM No 24 Tahun 2014 tentang Penatausahaan Hibah Langsung di Lingkungan Kementerian Perhubungan, Pencatatan Aset dilakukan apabila telah mendapatkan nomor registrasi dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kementerian Keuangan.

- B. Berkaitan dengan hal tersebut pada butir A, disepakati pencatatan asset terkait dengan P3D ke dalam Neraca Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dapat dilakukan setelah mendapatkan nomor registrasi dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kementerian Keuangan. Paling lambat pencatatan tersebut dilakukan pada Semester I tahun 2017.
- C. Pencatatan atas asset Barang Milik Negara tersebut dapat menggunakan nilai perolehan atau nilai wajar.
- D. Data dukung bukti kepemilikan untuk Tanah berupa Sertifikat, Gedung dan Bangunan berupa Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Apabila terdapat kekurangan dan atau bukti kepemilikan tidak dapat dilengkapi maka dapat digantikan dengan Surat Keterangan dari Kelurahan/Kecamatan/Pemilik atau Instansi terkait (Pihak Pemberi).
- E. Terkait Berita Acara Serah Terima yang belum selesai ditandatangani, maka pencatatan belum dapat dilakukan sampai proses administrasi selesai.

Apabila belum terdapat nilai perolehan atau nilai wajar maka Direktorat Jenderal Perhubungan Darat agar berkoordinasi dengan Direktorat Penilaian DJKN untuk dilakukan penilaian atas aset dimaksud.

F.4 PEMBENTUKAN BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT (BPTD) 2017

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 154 Tahun 2016, akan dibentuk Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebanyak 25 (dua puluh lima) lokasi, sebagai berikut:

- 1) BPTD Banda Aceh
- 2) BPTD Medan
- 3) BPTD Padang
- 4) BPTD Pekanbaru
- 5) BPTD Jambi
- 6) BPTD Bandar Lampung
- 7) BPTD Palembang
- 8) BPTD Serang
- 9) BPTD Bandung
- 10) BPTD Semarang
- 11) BPTD Surabaya
- 12) BPTD Denpasar
- 13) BPTD Kupang
- 14) BPTD Pontianak
- 15) BPTD Banjarmasin
- 16) BPTD Palangkaraya
- 17) BPTD Balikpapan
- 18) BPTD Kendari
- 19) BPTD Makassar
- 20) BPTD Palu
- 21) BPTD Gorontalo
- 22) BPTD Manado
- 23) BPTD Ambon
- 24) BPTD Ternate
- 25) BPTD Sorong

**F.5 LAPORAN EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN TA.
2016 POSISI 31 DESEMBER 2016 DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

a. Pagu Anggaran

Total Pagu DIPA TA. 2016 sebesar Rp3.811.622.954.000,-

• Rincian per Sumber Dana:

RM : Rp3.806.969.298.000,- (99,88%)

PNBP : Rp4.653.656.000,- (0,12%)

• Rincian per Jenis Belanja:

Belanja Pegawai : Rp89.657.220.000,- (2,35%)

Belanja Barang : Rp2.313.356.026.000,- (60,69%)

Belanja Modal : Rp1.408.609.708.000,- (36,96%)

b. Pagu Anggaran Setelah Penghematan Tahap I

Total Pagu DIPA TA. 2016 sebesar Rp3.513.101.562.000,-

• Rincian per Sumber Dana:

RM : Rp3.512.069.906.000,- (99,97%)

PNBP : Rp1.031.656.000,- (0,03%)

• Rincian per Jenis Belanja:

Belanja Pegawai : Rp90.057.220.000,- (2,56%)

Belanja Barang : Rp2.049.478.194.000,- (58,34%)

Belanja Modal : Rp1.373.566.148.000,- (39,10%)

c. Pagu Anggaran Setelah Penambahan Belanja Pegawai

Total Pagu DIPA TA. 2016 sebesar Rp3.518.426.925.000,-

• Rincian per Sumber Dana:

RM : Rp3.517.395.296.000,- (99,97%)

PNBP : Rp1.031.656.000,- (0,03%)

• Rincian per Jenis Belanja:

Belanja Pegawai : Rp95.382.583.000,- (2,71%)

Belanja Barang : Rp2.046.468.737.000,- (58,16%)

Belanja Modal : Rp1.376.575.605.000,- (39,12%)

d. Pagu Anggaran Setelah Penghematan Tahap II (*Self Blocking*)

Total Pagu DIPA TA. 2016 sebesar Rp3.023.959.690.000,-

- Rincian per Sumber Dana:

RM : Rp3.022.928.034.000,- (99,97%)

PNBP : Rp1.031.656.000,- (0,03%)

- Rincian per Jenis Belanja:

Belanja Pegawai : Rp95.382.583.000,- (3,15%)

Belanja Barang : Rp1.584.537.499.922,- (52,40%)

Belanja Modal : Rp1.344.039.607.078,- (44,45%)

e. Jumlah Satker di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 47 Satker, terdiri dari:

1) Kantor Pusat : 6 Satker

2) Balai : 5 Satker

3) OPP : 4 Satker

4) UPT : 3 Satker

5) Satker Provinsi : 29 Satker

f. Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2016 Posisi 31 Desember 2016

Realisasi penyerapan Anggaran setelah Penghematan tahap II (*self blocking*) DIPA TA. 2016 sebesar Rp3.023.959.690.000,- posisi per 31 Desember 2016 sebesar Rp2.836.894.157.566,- atau sebesar 93,18 persen, terdiri dari:

- Rincian per Sumber Dana:

RM : Rp2.836.195.051.835,- (93,82%)

PNBP : Rp699.105.731,- (67,77%)

- Rincian per Jenis Belanja:

BELANJA	PAGU	Realisasi	(%)
Belanja Pegawai	95.382.583.000	78.104.899.994	81,89
Belanja Barang	1.584.537.499.922	1.429.374.550.141	90,21
Belanja Modal	1.344.039.607.078	1.329.414.707.431	98,91
Jumlah	3.023.959.690.000	2.836.894.157.566	93,81

g. Kegiatan yang Dikontrakan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

Total rencana kegiatan yang dikontrakan sebanyak 825 Paket, terdiri dari:

a) Sudah Kontrak : 791 Paket

b) Belum Kontrak : 34 Paket

NO	SATUAN KERJA	NAMA KEGIATAN	ALASAN BELUM LELANG
1.	Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor di Bekasi	Review Grand Design Balai PLJSKB	Self Blocking
2.	Satuan Kerja Perhubungan Darat Provinsi NTT	Pemb. Derm. Penyeb. Rajjua Kab. Sabu Rajjua Thp II (Termasuk supervisi)	Self Blocking
3.	Satuan Kerja Perhubungan Darat Provinsi Sulawesi Utara	Peningkatan Kinerja Lalu Lintas Wilayah Perkotaan di Kota Manado	Self Blocking
4.	Sekretariat Ditjen Perhubungan Darat	Renovasi Ruang Kantor Pusat Ditjen Hubdat	Tidak dilaksanakan
5.	Sekretariat Ditjen Perhubungan Darat	Jasa Profesional Lawyer dalam proses litigasi dan litigasi pada Ditjen Hubdat	Self Blocking
6.	Direktorat Angkutan dan Multimoda	Paket Pengadaan Bus Ukuran Sedang BRT (19 Paket)	Self Blocking
7.	Direktorat Angkutan dan Multimoda	Pengadaan Bus Besar BRT (4 Paket)	Self Blocking
8.	Direktorat Prasarana Perhubungan Darat	Perencanaan Teknis dan Detailed Engineering Design (DED) Fasilitas Integrasi Moda di Kota Semarang dan Sekitarnya	Self Blocking
9.	Direktorat Prasarana Perhubungan Darat	Penyelenggaraan Operasional Terminal Tipe A	Tidak dilaksanakan

10.	Balai Lalu Lintas Angkutan Jalan SDP Jambi	Pemeliharaan Fasilitas Perlengkapan Jalan di Jalan Nasional (Termasuk Supervisi)	Self Blocking
11.	Balai Lalu Lintas Angkutan Jalan SDP Palangkaraya Kalteng	Rehabilitasi Jembatan Timbang Anjir Serapat Kab. Kapuas Thp III (termasuk supervisi)	Self Blocking
12.	Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo	Penerbitan Sertifikat Tanah Pelabuhan Penyeberangan Marisa	Self Blocking
13.	Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Merak Di Prov. Banten	Survei Pemasangan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran di Wilayah Tj. Uban - Tlaga Pungkur	Self Blocking

h. Kegiatan yang diblokir sebesar Rp494.467.235.000,-

- 1) Satuan Kerja Perhubungan Darat Provinsi Aceh sebesar Rp. 1.381.901.000,-
- 2) Satuan Kerja Perhubungan Darat Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 3.683.129.000,-
- 3) Satuan Kerja Perhubungan Darat Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 343.411.000,-
- 4) Satuan Kerja Perhubungan Darat Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp. 1.341.399.000,-
- 5) Satuan Kerja Perhubungan Darat Provinsi Banten sebesar Rp. 855.101.000,-
- 6) Satuan Kerja Perhubungan Darat Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 466.927.000,-
- 7) Satuan Kerja Perhubungan Darat Provinsi D.I Yogyakarta sebesar Rp. 401.275.000,-
- 8) Pelabuhan Penyeberangan Kalabahi sebesar Rp. 297.700.000,-
- 9) Satuan Kerja Perhubungan Darat Provinsi Kalimantan Utara sebesar Rp. 167.698.000,-
- 10) Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo sebesar Rp. 200.000.000,-

- 11) Satuan Kerja Perhubungan Darat Provinsi Gorontalo sebesar Rp. 80.329.000,-
- 12) Satuan Kerja Perhubungan Darat Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar Rp. 2.331.879.000,-
- 13) Satuan Kerja Perhubungan Darat Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp. 27.971.000,-
- 14) Satuan Kerja Perhubungan Darat Provinsi Maluku sebesar Rp. 1.212.291.000,-
- 15) Satuan Kerja Perhubungan Darat Provinsi Maluku Utara sebesar Rp. 1.308.888.000,-
- 16) Satuan Kerja Perhubungan Darat Provinsi Papua sebesar Rp. 346.200.000,-
- 17) Balai Lalu Lintas Angkutan Jalan SDP Jambi sebesar Rp. 7.217.966.000,-
- 18) Balai Lalu Lintas Angkutan Jalan SDP Denpasar sebesar Rp. 343.705.000,-
- 19) Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Merak Di Provinsi Banten sebesar Rp. 630.378.000,-
- 20) Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Pagimana Di Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp. 289.901.000,-
- 21) Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk Di Bali sebesar Rp. 199.285.000,-
- 22) Direktorat Pembinaan Keselamatan sebesar Rp. 2.163.423.000,-
- 23) Direktorat Lalu Lintas Perhubungan Darat sebesar Rp. 2.692.707.000,-
- 24) Setditjen Perhubungan Darat sebesar Rp. 8.150.000.000,-
- 25) BPLJSKB Bekasi sebesar Rp. 7.126.111.000,-
- 26) Satuan Kerja Perhubungan Darat Provinsi NTT sebesar Rp. 7.534.579.000,-
- 27) Satuan Kerja Perhubungan Darat Provinsi Sulawesi Utara sebesar Rp.1.099.538.000,-

- 28) Direktorat Angkutan dan Multimoda sebesar Rp. 424.439.374.000,-
 - 29) Direktorat Sarana Transportasi Darat sebesar Rp. 10.166.217.000,-
 - 30) Direktorat Prasarana Perhubungan Darat sebesar Rp. 4.668.464.000,-
 - 31) Satuan Kerja Perhubungan Darat Provinsi Di Kalimantan Selatan sebesar Rp. 641.488.000,-
 - 32) Balai Lalu Lintas Angkutan Jalan SDP Palangkaraya sebesar Rp. 2.658.000.000,-
- i. Realisasi Anggaran yang tidak terserap sebesar Rp681.532.768.000,-
- 1) Kegiatan Tidak Dilaksanakan sebesar Rp27.560.261.000,- terdiri dari:
 - a. Satker Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pada kegiatan Renovasi Gedung Kantor sebesar Rp3.800.000.000,- dikarenakan gagal kontrak;
 - b. Satker Direktorat Prasarana Perhubungan Darat pada kegiatan Penyelenggaraan operasional Terminal Penumpang Tipe A sebesar Rp23.760.261.000,- dikarenakan belum selesainya proses pengalihan personil, peralatan, pendanaan dan dokumen (P3D) baik Terminal penumpang Tipe A maupun UPPKB (Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor/Jembatan Timbang).
 - 2) Kegiatan tidak selesai sebesar Rp5.246.855.000,- pada satker Perhubungan Darat Provinsi Maluku pada kegiatan Pembangunan Kapal Ro Pax 600 GT Lintas Tual – Air Nanang Tahap II (termasuk supervisi) – MYC;
 - 3) Sisa kontrak sebesar Rp71.713.770.000,-;
 - 4) *Self Blocking* sebesar Rp494.467.235.000,-
 - 5) Sisa dana kegiatan sebesar Rp82.544.647.000,-.

- j. Kendala dan Hambatan Penyerapan Anggaran
- 1) Sisa kontrak yang didapat dari selisih nilai pagu dengan nilai kontrak;
 - 2) Subsidi (d disesuaikan dengan pelayanan yang dilakukan);
 - 3) Layanan perkantoran (efisiensi terhadap belanja barang);
 - 4) Sisa perjalanan dinas;
 - 5) Belanja rutin (gaji, listrik, air, telepon, internet, dll);
 - 6) Kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan (peningkatan kinerja Jembatan Timbang dan penyelenggaraan operasional Terminal Penumpang Tipe A, karena menunggu proses P3D).